

**PERAN KAUM BORJUIS DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA
(STUDI KASUS DESA MALINO KECAMATAN
BALAESANG KABUPATEN DONGGALA)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana
Sosial
(S.Sos) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

OLEH:

AWALUDIN
18.2.17.0001

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2024**





PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERAN KAUM BORJUIS DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA MALINO KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA)” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 22 Januari 2025
Palu, 22 Rajab 1446 H

Penyusun,

Awaludin _____
NIM. 18.7.12.0001



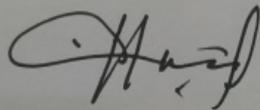
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran Kaum Borjuis dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala)” oleh mahasiswa atas nama Awaludin NIM: 18.7.12.0001, mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 28 Desember 2024

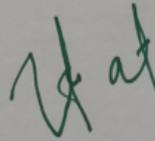
Palu, 26 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing I,



Dr. Rusdin, S.Ag., M.Fil.I
NIP.197001042000031001

Pembimbing II,

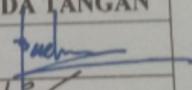
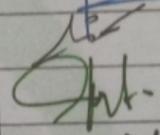
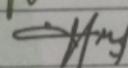
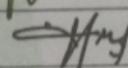
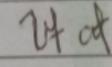


St. Rabiatul Wahdaniyah H., M.Si
NIP. 198701252019032010

PENGESAHAN SKRIPSI

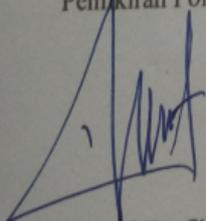
Skripsi saudara Awaludin NIM. 18.7.12.0001 dengan judul "Peran Kaum Borjuis dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala)" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 12 Februari 2024 M yang bertepatan dengan tanggal 2 Syaban 1445 H dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Pemikiran Politik Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	Fachriza Ariyadi, S.I.Kom., M.Si.	
Munaqisy I	Dr. Syamsuri, M.Ag.	
Munaqisy II	Sunardi, S.IP., M.PA.	
Pembimbing I	Dr. Rusdin, S.Ag., M.Fil.I	
Pembimbing II	St. Rabiatul Wahdaniyah H., M.Si	

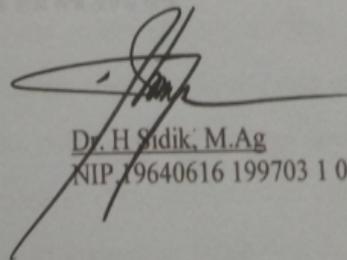
Mengetahui:

Ketua Jurusan
Pemikiran Politik Islam,



Muhammad Taufik, M.Sos.
NIP.19860422 201903 1 002

Dekan Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah,



Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP.19640616 199703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, Karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peran Kaum Borjuis dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala)”.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, doa serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Orang tua tercinta Papa dan Mama yang telah memberikan sumbangsinya dalam penyelesaian studi ini dan juga telah

membesarkan, mendidik, serta seluruh pihak yang banyak membantu penulis, baik secara materil, moril, dan spiritual sejak dari awal studi hingga tahap penyelesaian studi penulis.

2. Nurjanah S.E selaku istri tercinta yang telah menghabiskan masa studi bersama penulis dan melalui perjalanan waktu semasa kuliah yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah baik itu secara moril tenaga pikiran serta cinta
3. Bapak Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Faisal At-Tamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama beserta unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
4. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Serta. Ibu Dr. Soraya At-Tamimi, S.Ag., M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan, Ibu Dr. Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil. I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Tamrin, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Taufik, S.Sos.I., M.Sos. dan Bapak Fachriza Ariyadi, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN

Datokarama Palu.

6. Bapak Dr. Rusdin, S.Ag., M.Fil.I dan Sitti Rabiatal Wahdaniyah H., M.Si masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah berupaya memberikan bimbingannya dan arahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Syamsuri, M.Ag. selaku penguji seminar proposal yang telah berupaya memberikan arahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rusdin, S.Ag., M.Fil.I selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu Ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan nasehat selama ini serta mengarahkan dalam penulisan skripsi.
9. Bapak Rifai, S.E., M.M. Selaku Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu dan Petugas perpustakaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis serta fasilitas berupa berbagai literatur/referensi yang telah dibutuhkan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Datokarama Palu yang dengan Ikhlas memberikan pengajaran dan Pelayanan Selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
11. Seluruh mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu Angkatan 2018 terkhusus kepada semua teman kelas Pemikiran Politik 1 yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga akhir penyelesaian studi.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 22 Januari 2025 M

Palu 22 Rajab 1446 H

Penulis

AWALUDIN
NIM. 18.7.12.0001

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan istilah.....	8
E. Garis-Garis Besar Isi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11



B. Kajian Teori.....	15
1. Demokrasi Borjuis.....	15
2. Teori Elit.....	18
3. Peran Elit Lokal dalam Bisnis di Desa.....	20
4. Teori Hegemoni.....	21
5. Etika politik.....	23
6. Etika Politik Islam.....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Kehadiran Peneliti.....	25
D. Data dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Pengesahan Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Malino.....	31
1. Sejarah singkat Desa Malino.....	31
2. Keadaan Geografis.....	31
3. Data Penduduk.....	32
4. Potensi Desa Malino.....	32
5. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	32
6. Keadaan Sosial.....	33
7. Organisasi Sosial.....	33
8. Kebudayaan.....	33
B. Temuan Hasil Penelitian.....	34
1. Daftar Pemilih Tetap.....	34
2. Daftar Narasumber.....	34
3. Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Pertama.....	35
4. Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Kedua.....	37
5. Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Ketiga.....	38
6. Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Keempat (Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu).....	41
C. Pembahasan.....	43

1. Proses Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....	43
2. Peran Kaum Borjuis dalam Pemilihan Kepala Desa.....	49
3. Dampak Positif dan Negatif Peran Kaum Borjuis Dalam Pemilihan Kepala Desa.....	53
4. Dampak positif dan Negatif Kaum Borjuis Terhadap Kebijakan Kepala Desa.....	55
5. Kaum Borjuis Sebagai Ikatan Sosial dan Kekuatan Modal.....	57
6. Calon Kepala Desa yang Mendapat Dukungan Kaum Borjuis	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4.1 Data Kependudukan.....	32
Tabel 4.2 Daftar Narasumber.....	34
Tabel 4.3 Daftar Pemilih Tetap Tahun 2006, 2012, 2019, dan 2023.....	35
Tabel 4.4 Perhitungan Hasil Suara Tahun 2006.....	36
Tabel 4.5 Perhitungan Hasil Suara Tahun 2012.....	37
Tabel 4.6 Perhitungan Hasil Suara Tahun 2019.....	39
Tabel 4.7 Perhitungan Hasil Suara Tahun 2023.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	24
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Pedoman Wawancara
- Lampiran 2: Hasil Wawancara Responden 1
- Lampiran 3: Hasil Wawancara Responden 2
- Lampiran 4: Hasil Wawancara Responden 3
- Lampiran 5: Hasil Wawancara Responden 4
- Lampiran 6: Hasil Wawancara Responden 5
- Lampiran 7: Hasil Wawancara Responden 6
- Lampiran 8: Lembar Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 9: Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 10: Surat Izin Meneliti
- Lampiran 11: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 12: Dokumentasi
- Lampiran 13: Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama : Awaludin

Penulis

NIM : 18.2.17.0001

Judul Skripsi : "Peran Kaum Borjuis dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala)"

Penelitian ini di latar belakang fenomena kemunculan kaum borjuis di Desa Malino yang mempengaruhi sistem perpolitikan desa dengan penguasaan ekonomi dan monopoli perdagangan sebagai senjata utama dalam mendapatkan perhatian khusus melalui relasi kuasa yang diberikan oleh kepala Desa. Penelitian ini berdasarkan hasil observasi peneliti yang mencari titik jenuh terhadap keterkaitan antara kaum borjuis dan relasi



kuasa yang mampu mempengaruhi sistem perpolitikan yang ada di Desa Malino, status sosial, dan relasi kuasa oleh elit lokal.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan *snow ball sampling* untuk mencari titik jenuh dari masalah yang di teliti dengan menggunakan informan kunci sebagai sumber data utama. Penelitian ini berdasarkan dengan beberapa teori yang di gunakan peneliti di antaranya: Demokrasi borjuis, teori elit, teori hegemoni, dan etika politik. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam pemilihan kepala Desa Malino, kaum borjuis ada keterlibatan dalam usaha memenangkan salah satu calon kepala Desa dengan menggunakan kekuatan ekonomi yang di miliki, untuk membiayai kampanye dan serangan fajar.

Peneliti dapat menyimpulkan erat kaitannya antara kaum borjuis dan calon kepala desa dalam usaha memenangkan pemilihan kepala dengan dengan menggunakan kekuatan ekonomi dan monopoli usaha sebagai kekuatan utama mempengaruhi orang lain, dan menjadikan para pekerja yang dimilikinya sebagai tim sukses.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Borjuis adalah sebuah kelas sosial dari orang-orang yang dicirikan oleh kepemilikan modal dan kelakuan yang terkait dengan kepemilikan tersebut. Mereka adalah bagian dari kelas menengah kekuatan ekonomi dan sosial dari pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan. Hal ini dibedakan dari kelas sosial yang kekuasaannya didapat dari lahir di dalam sebuah keluarga aristokrat pemilik tanah yang bergelar, yang diberikan hak feodal istimewa oleh raja/monarki. Kaum Borjuis muncul di kota-kota yang ada di akhir zaman feodal dan awal zaman modern, melalui kontrol perdagangan jarak jauh dan manufaktur kecil. Kata *borjuis* dan *borju* berasal dari bahasa Prancis yaitu *bourgeoisies*, yang berarti "penghuni-kota" (dari *Bourg*, bdk. Bahasa Jerman *Burg*).

Borjuis merupakan salah satu kelas menurut faham dan filsafat *historis materialis* dari Karl Marx. Golongan borjuis terutama terdiri dari kaum pedagang, industriawan, para hartawan, pegawai-pegawai menengah ke atas, tuan-tuan tanah dan sebagainya. Golongan ini memiliki kehidupan ekonomi yang cukup kuat sehingga kekuatan yang tangguh dalam lapangan produksi, menguasai alat-alat produksi dan perdagangan. Sehingga Marxisme mendefinisikan borjuis sebagai kelas sosial yang memiliki alat-alat produksi dalam masyarakat kapitalis. Marxisme memandang bahwa kelompok ini muncul dari kelas-kelas orang kaya di perkotaan pada masa pra (sebelum) dan awal masyarakat kapitalis¹. Jadi,

¹ Karl Marx dan Frederick Engels, *Ideologi Jerman Jilid I- Feuerbach, terjemahan Nasikhul Mutamanna* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2013), h.14

berdasarkan pengertian tersebut maka pengertian golongan borjuis menunjukkan



pada beragam kelompok sosial dalam masyarakat diluar golongan agamawan dan golongan bangsawan yang memiliki beragam aktivitas.

Kehidupan golongan borjuis dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga sudut pandang di bawah ini:²

1. Bidang Politik

Dalam bidang politik golongan borjuis tidak memiliki kedudukan yang kokoh. Ada yang menjadi pejabat rendahan seperti pejabat dalam bidang peradilan dan keuangan, penagih pajak dan kasir, hakim, notaris, panitaera, kuasa hukum dan lain-lain. Mereka mendapatkan kebebasan untuk tidak membayar pajak mereka tidak memiliki kedudukan yang kuat namun mereka menjadi tahu mengenai sistem pemerintahan, hukum dan kenegaraan.

2. Bidang Sosial

Dalam bidang sosial golongan borjuis memiliki kedudukan yang cukup kuat dan masih berada dibawah golongan agamawan dan bangsawan. Kedudukan mereka sebagai pejabat rendahan dan juga sebagai dokter, pengacara, penulis dan seniman, usahawan, banker, pedagang besar dan kaum industrialis telah menempatkan dalam strata tertinggi dalam golongan ketiga.

3. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, golongan ketiga merupakan pemilik modal. Mereka memiliki banyak perusahaan baik di kota kota besar maupun di pinggiran kota bahkan para bangsawan yang menguasai perekonomian berbalik. Oleh karena itu selanjutnya kaum borjuis menguasai perekonomian dan pada akhirnya menguasai pemerintahan.

² Djaja Wahjudi, *Sejarah Eropa Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern* (Yogyakarta: Ombok, 2012). h.91

Borjuis muncul sebagai fenomena sejarah dan politik di abad ke-11 ketika kota-kota kecil di wilayah Eropa Tengah dan Barat berkembang menjadi kota-kota yang didedikasikan untuk perdagangan. Perluasan kota ini dimungkinkan berkat konsentrasi ekonomi karena kemunculan organisasi mandiri yang melindungi bahkan menjadi perserikatan. Perserikatan muncul ketika pengusaha individu seperti pengrajin dan pedagang. Bertentangan dengan masyarakat pribumi mereka yang mencari sewa dan mereka pula menuntut sewa lebih besar dari yang disepakati sebelumnya. Pada akhir abad pertengahan sekitar 1500 M, di bawah rezim monarki nasional awal Eropa Barat, kaum borjuis bertindak demi kepentingan pribadi, dan secara politis mendukung raja atau ratu terhadap gangguan hukum dan keuangan yang disebabkan oleh keserakahan para penguasa feodal. Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, kaum borjuis Inggris dan Belanda telah menjadi kekuatan finansial (serta politis) yang menggulingkan tatanan feodal. Kekuatan ekonomi telah mengalahkan kekuatan militer di bidang politik.³

Selama abad ke-17 dan ke-18, kaum borjuis adalah kelas sosial yang progresif (secara politis) mendukung prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional dan hak alamiah, melawan hukum *privilese* dan klaim-klaim kekuasaan dengan hak ilahi bahwa para bangsawan dan wali gereja telah melakukan latihan secara otonom selama perintah feodal. Pada abad ke-19, kaum borjuis mengemukakan liberalisme, dan memperoleh hak politik, hak agama, dan kebebasan sipil untuk diri mereka sendiri dan kelas sosial yang lebih rendah; dengan demikian kaum borjuis adalah kekuatan

³Miriam Budiarto "Dasar-Dasar Ilmu Politik" (Pt. Gramedia Jakarta) 1983, h.77.

filosofis dan politik yang progresif dalam masyarakat Barat.⁴

Setelah Revolusi Industri (1750-1850), pada pertengahan abad ke-19 ekspansi kelas sosial borjuis yang besar menyebabkan stratifikasi (oleh aktivitas bisnis dan oleh fungsi ekonomi) ke dalam borjuis besar (bankir dan industrialis) dan borjuis kecil (pedagang dan pekerja kerah putih). Terlebih lagi, pada akhir abad ke-19, kaum kapitalis (borjuis asli) telah naik ke kelas atas, sementara perkembangan teknologi dan pekerjaan teknis memungkinkan naiknya laki-laki dan perempuan kelas pekerja ke lapisan bawah borjuasi.⁵

Dilihat dari sejarahnya, hukum nasional (modern) Indonesia tidak lain merupakan kelanjutan dari hukum kolonial (Belanda), dan pada gilirannya sejarah hukum kolonial itu adalah kelanjutan sejarah hukum Eropa Barat. Perkembangan hukum Eropa Barat dengan segala tradisinya sebagaimana dikenal sekarang sebagai hukum modern, pada awalnya berakar pada tradisi hukum Indo-Jerman dan Romawi Kristiani, dan yang dimutakhirkan lewat revolusi-revolusi, mulai dari apa yang disebut "*Papal Revolution*" sampai kepada apa yang dikenai revolusi kaum borjuis-liberal di Perancis pada akhir abad ke-17. Perkembangan pasca Revolusi Perancis sangat mempengaruhi pula perkembangan hukum di negeri Belanda dan di negeri jajahannya yang kala itu disebut Hindia Belanda. Ciri-ciri hukum (modern) Eropa Barat yang terwariskan melalui proses transplantasi sampai ke negeri Indonesia sekarang ini yang penting antara lain.

⁴*Ibid*, h.80-81

⁵Nur Rohim Yunus "*Implikasi Demokrasi Borjuis Dalam Kehidupan Bernegara*" Vol 3, No 2 (2016)

- a. Bahwa hukum itu bersifat positif, dalam arti dinyatakan secara eksplisit dalam rumus-rumus pasal ayat yang tertulis (*cor pus iuris*) demi terjaminnya kepastian.
- b. Bahwa hukum itu dilandasi oleh keyakinan ideologik, bahwa hukum yang dalam maknanya yang demikian itu berstatus supremasi mengatasi norma-norma sosial lain yang tidak atau belum dipositifkan (sebagai hukum tege).
- c. Bahwa hukum itu memiliki karakter historisitas, yang berarti bahwa hukum barat itu selalu dalam proses perubahan dialektik-dialogik yang terus-menerus, menuju ke kesempurnaan yang fungsional
- d. Bahwa hukum itu dirawat dan dikelola secara eksklusif oleh kaum professional tertentu.
- e. Bahwa untuk kelestarian profesi ini ditunjang oleh adanya institusi pendidikan.⁶

Tradisi hukum (modern) barat yang diintroduksikan ke Indonesia oleh kaum kolonial ini sebenarnya mempunyai tradisi sejarahnya tersendiri, yang tentunya berbeda dengan tradisi sejarah yang ada di bumi nusantara. Menurut Gianfranco Poggi proses pembentukan hukum modern barat tak dapat dilepaskan membagi tahapan pembentukan negara modern melalui berbagai tahapan yaitu : (1) masa *feodal*, (2) *standestaat*, (3) *Absoiutisme*, (4) masyarakat sipil; dan (5) negara konstitusional⁷

Pembentukan negara konstitusional (modern) dan hukum modern di Eropa Barat. Tak dapat dilepaskan dari pengaruh golongan masyarakat

⁶ Wallace Mendeison, "Law And The Development Ofnation", The Journal Of Politic. Vol. 32 (1970), h.223.

⁷ Saptijo Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Edisi Terbaru, Citra Aditiya Bakti, 1991), h.215.

borjuis, yaitu kelompok dalam masyarakat yang diberi ciri oleh kekayaan dan pendidikan. Di Eropa Barat, kaum borjuasi muncul terkait erat dengan munculnya masyarakat sipil *civil society* pada masa sistem peraturan yang absolut yang sangat didominasi oleh kekuasaan Negara. Lahirnya kelas borjuis ini sebagai awal lahirnya masyarakat sipil (*civil society*) di Eropa. Kaum borjuis di Eropa terdiri dari para usahawan kapitalis yang mengalami kemajuan sehingga menginginkan identitas tersendiri sebagai kelas tertentu. Kelas ini menghendaki kompetisi di antara anggotanya yaitu perorangan dengan kepentingan-kepentingan sendiri sehingga akan tercipta keadaan yang *ekuilibrium*.⁸

Kelas ini tidak menghendaki adanya kekuasaan sebab dengan adanya kekuasaan didalam kelas akan menyebabkan kekuasaan tersebut berhadapan dengan golongan lain yang tidak mempunyai kekuasaan. Keadaan ini menyebabkan tidak terciptanya kompetisi yang sepadan lagi. Di lain pihak golongan borjuasi juga menghendaki adanya peraturan yang dapat menjamin berjalannya sistem pasar yang otonom. Mereka menghendaki agar badan yang menyelenggarakan hukum secara struktural berada di atas semua kelas, yaitu yang mempunyai sifat publik yang khas dan berkedaulatan.⁹

Negara seolah-olah berada di atas masyarakat yang membentuk organisasinya sendiri terdiri dari jabatan-jabatan dan pejabat-pejabatnya. Dalam kedudukan yang demikian, negara menghadapi masyarakatnya yang dilihatnya semata-mata terdiri dari orang-orang atau individu-

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Edisi Terbaru* (Bandung: Citra aditya Bakti,1991), h. 215.

⁹Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Golongan Bojuis/ Borjuasi Adalah Golongan Masyarakat Kelas Menengah, Yaitu Golongan Bangsawan Hartawan

individu.¹⁰ Negara menghadapi dan memperlakukan individu-individu dalam kapasitasnya sebagai subjek-subjek, sebagai pembayar pajak, wajib bela negara dan sebagainya. Di sini masyarakat hanya dianggap sebagai kumpulan individu-individu yang hanya mampu melakukan kegiatan dan hubungan di antara sesama apabila disediakan dan digerakkan oleh hukum.

Penulis sangat tertarik karena dalam praktek politik borjuis yang umumnya dikenal masyarakat melalui teori maupun karya ilmiah kaum borjuis mengarah ke pada peradaban Eropa, akan tetapi warna politik borjuis di Desa Malino namun dalam konteks yang berbeda karena yang menjadi kaum borjuis di desa tersebut berasal dari etnis Tionghoa yang terkenal dengan sistem perekonomian kapitalis, mereka mendominasi dalam aspek perdagangan maupun bidang usaha lainnya terkhusus dalam bidang pertambangan kerikil yang mengganggu sumber air bersih masyarakat meskipun mereka mengantongi izin. Kondisi faktual yang terjadi di Desa Malino dapat di lihat dengan adanya pergerakan masyarakat yang menentang kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah Desa Malino di antaranya kegiatan pengambilan kerikil yang dilakukan oleh salah satu pengusaha yang bergaris keturunan Tionghoa. Inilah yang menjadi mengapa penulis tertarik mengangkat judul "Peran Kaum Borjuis dalam pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala)"

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang di atas menjadi rumusan

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Edisi Terbaru* (Bandung: Citra aditya Bakti,1991), h. 215.

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kaum borjuis dalam pemilihan kepala Desa Malino?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif dari kaum borjuis dalam pemilihan Kepala Desa Malino?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Peran kaum borjuis dalam pemilihan kepala Desa Malino.

Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari peran kaum borjuis dalam pemilihan Kepala Desa Malino

2. Kegunaan Penelitian

- a. Segi akademisi penelitian diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan ilmu terhadap perkembangan di dunia pendidikan khususnya di bidang ilmu politik.
- b. Segi praktisi hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai arahan informasi politik bagi pemerintah ataupun masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul "Peran Kaum Borjuis dalam Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus di Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala". Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang

terkandung di dalamnya .

1. Borjuis disebut sebagai kelas sosial yang terdiri dari golongan menengah ke atas yang juga merupakan pemilik modal. Gagasan borjuis sebagian besar merupakan konstruksi dari Karl Marx (1818–1883) dan mereka yang dipengaruhi olehnya. Kaum borjuis mulai tumbuh di Eropa dari abad ke-11 dan khususnya selama zaman Renaisans abad ke-12, seiring dengan perkembangan pertama eksodus pedesaan dan urbanisasi.¹¹
2. Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu Negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Tentu bukanlah hal mudah untuk mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian.¹²
3. Hegemoni adalah kekuasaan yang mendominasi yang di miliki suatu kelompok sosiala atas kelompok sosial lainnya hegemoni mengimplikasikan persetujuan sukarela masyarakat untuk di atur berdasarkan perinsip-perinsip, aturan dan hukum yang mereka percaya beroperasi untuk kesejahteraan bersama, walau sebenarnya

¹¹ Tokopedia, "Borjuis", <https://Kamus.Tokopedia.Com/B/Borjuis/> Diakses Pada 21 April 2022 Pukul 10.30

¹²Asmika Rahman, *Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 10 No 1, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 2018), h.45.

tidak. Sosial consent adalah sarana kontrol yang lebih efektif daripada koersi atau kekerasan)¹³

4. Demokrasi borjuis sebagaimana demokrasi rakyat merupakan kelas, atau bentuk demokrasi yang memuat secara pandang kelas.¹⁴
5. Teori elit menurut para ilmuwan kekuasaan lebih terkonsentrasi pada sedikit kelompok atau individu¹⁵

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan penalaran pembahasan pokok permasalahan yang akan dibahas maka, skripsi ini disusun kedalam lima (5) bab yaitu:

Bab I adalah pendahuluan dimana pada pendahuluan ini terdiri dari lima sub bab yakni tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan diakhiri dengan garis-garis besar isi.

Bab II adalah kajian pustaka yang terdiri dari tiga sub bab yaitu penelitian terdahulu, kajian teori yang merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi yang membahas secara teoritis mengenai peran kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa, terdiri dari demokrasi borjuis, teori elit, teori hegemoni, etika politik dan etika politik Islam, serta diakhiri dengan kerangka pemikiran.

Bab III adalah metode penelitian mengemukakan beberapa metode

¹³Mainadmin, "Memahami Konsep Hegemoni", <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/memahami-konsep-hegemoni/> diakses Pada 14 Desember 2024

¹⁴ Scott Cooper, "demokrasi Borjuis", <https://www.leftvoice.org/bourgeois-democracy-what-do-marxists-mean-by-that-term/> diakses pada 14 Desember 2024

¹⁵ Nur Rohim Yunus, *Implikasi Demokrasi Borjuis Dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Dan Kekuasaan Jurnal Politik, Vol. 4, No. 1, Agustus 2018

sebagai pengembangan pembahasan ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data yang sesuai dengan fakta.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan penulis membagi menjadi beberapa sub bab di antaranya gambaran umum desa malino, data pemilihan, dan pemilihan kepala desa. Hasil dan pembahasan yang penulis tulis merupakan hasil temuan peneliti selama berada di lapangan guna mendapatkan data yang akurat.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis untuk mengembangkan penelitian selanjutnya serta di akhiri dengan daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari tinjauan penulis di perpustakaan UIN Datokarama Palu maupun dengan membaca beberapa buku yang berkaitan dengan kajian penulis, maka penulis tidak mendapatkan penelitian sebelumnya yang membahas tentang “Peran Kaum Borjuis Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala)” Akan tetapi, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis.

1. Skripsi ini di tulis oleh Riyan hidayat annuri dengan judul,” Kuasa Bajingan dalam Politik Desa (Studi Tentang Dominasi Bajingan dalam Stabilisasi Desa di Desa Nyambakan Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep)”. Ini dapat di buktikan dengan beberapa faktor sebagai berikut kultur keagamaan yang mana masyarakat Sumenep termasuk masyarakat Nyambakan Barat, terkenal dengan orang yang berpegang teguh pada paham agama Islam sebagian masyarakat pada umumnya. Peran elit bajingan dalam politik pemerintah Desa Nyambakan Barat antara lain pertama, bajingan yang menjabat sebagai salah satu kepala Dusun berperan dalam mengkoordinir keamanan Desa. Kedua, bajingan mendistribusi kan sumber-sumber material untuk para bajingan. Dalam menjalankan perannya tersebut, para bajingan di fasilitasi berupa sembako, dan jumlah uang rupiah pada elit bajingan. Ketiga, dominasi bajingan di lakukan kekerasan persuasif kepada

masyarakat desa Nyambakan Barat.¹

¹ Rian Hidayat, *Kuasa Bajingan Dalam Politik Desa (Studi Tentang Dominasi Bajingan Dalam Stabilitas Pemerintahan Desa Di Desa Nyambakan Barat Kecamatan Batang-Batang kabupaten Sumenep)* (2018).



2. Skripsi ini di tulis oleh Ikhtiar Setiawan dengan judul “Pengaruh Higemoni Politik Masyarakat Transmigrasi Jawa Terhadap Penduduk Lokal pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin pada Tahun 2016)” ini dapat di buktikan dengan beberapa faktor berikut:
- a. Pengaruh higemoni terhadap pilihan politik itu terjadi sangat mempengaruhi. Di dalam pilkades Desa Tambang Emas tahun 2016 di temukan adanya peran higemoni politik masyarakat Jawa
 - b. Faktor sosiologi cenderung lebih berpengaruh dalam pemilihan, selain dari faktor dominasi dan faktor keinginan, di karenakan pemilih lebih cenderung menentukan pilihanya berdasarkan suku yang sama atau berdasarkan daerah yang sama, sebab mereka menganggap sudah sebagai saudara sendiri.²
3. Skripsi ini di tulis oleh Hari Febriansyah dengan judul “Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Pancamukti Kecamatan Muara Talang Kabupaten Banyuasin Tahun 2019)”. Ini dapat di buktikan pada faktor berikut:
- a. Dalam pengaruh politik identitas pemenangan dalam pemilihan Kepala Desa Panca Mukti sangat tepat, dikarenakan politik identitas menjadi politik turun temurun di Desa Pancamukti, kepercayaan masyarakat akan calon pemimpin pemerintah bergantung seberapa kuat sesepuh desa dan tokoh masyarakat dalam mencari suara. Kurangnya kepedulian masarakat terhadap pemerintah desa atau perpolitikan

² Ihktiar Setiawan Pengaruh Hegemoni Politik Masarakat Trans Migrasi Jawa Terhadap Penduduk Lokal Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin2016 Fakultas Syaryiah Universitas Islam Negrri Sultan Thaha Saifuddun Jambi 2018

desa menjadikan strategi pemenangan dengan menggunakan politik identitas ini sangat tepat.

- b. Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa memang politik identitas itu masih ada di desa panca mukti dan masih di gunakan sampai sekarang ialah strategi politik identitas dalam memenangkan sebuah pemilihan kepala desa dari yang tidak memiliki figur apapun pemerintah desa bisa sukses dalam pemilihan kepala desa karena menggunakan strategi politik identitas³

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kuasa Bajingan dalam Politik Desa (Studi Tenang Dominasi Bajingan dalam Stabilisasi Desa di Desa Nyambakan Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep). (Riyan Hidayat Annuri, 2018)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas mengenai para elit politik desa yang mendominasi dalam pemilihan lokal.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, maupun objek yang di teliti yang mana penelitian sebelumnya meneliti mengenai sistem pemerintahan dan pengambilan kebijakan sedangkan penulis terfokus pada

³ Hari Febriansyah Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Panca Mukti Kecamatan Muara Talang Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2021

			strategi politik.
2.	Pengaruh Hgemoni Politik Masyarakat Transmigrasi Jawa Terhadap Penduduk Lokal pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin pada Tahun 2016) (Ikhtiar Setiawan, 2018)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas mengenai strategi yang di gunakan dalam pemilihan kepala desa.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan cara pandang terhadap strategi yang di gunakan peneliti dalam meneliti mengenai hgemoni sedangkan penulis terfokus pada campurtangan kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa.
3.	Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Pancamukti Kecamatan Muara Talang Kabupaten	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas mengenai strategi dalam pemenangan pemilihan kepala	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan cara pandang mengenai strategi yang di gunakan yang mana dalam

	Banyuasin Tahun 2019) (Hari Febriansyah, 2021)	desa.	penelitian ini peneliti membahas tentang strategi politik identitas sedangkan penulis dalam penelitiannya membahas mengenai campur tangan kaum borjuis.
--	---	-------	---

B. Kajian Teori

1. Demokrasi Borjuis

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentukan dari kata *demos* (rakyat) dan *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) dimana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme.⁴

Demokrasi adalah sebuah sistem alternatif yang menjadi tatanan aktivitas masyarakat dalam negara. Demokrasi adalah seperti apa yang pernah dikatakan oleh Abrahah Lincoln bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai

⁴ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) h.35

keputusan politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Menurut Sidney Hook demokrasi merupakan bentuk pemerintahan, dimana keputusan pemerintah secara langsung tidak langsung berdasarkan kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Sedangkan menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl demokrasi adalah sistem pemerintahan, dimana pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara. Dari beberapa pendapat ahli tentang demokrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan.⁵

Secara umum, ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan. Mereka yang mempunyai kekayaan yang paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Mereka yang mempunyai kekuasaan atau wewenang terbesar termasuk dalam lapisan teratas. Mereka yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat teratas di masyarakatnya. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan menempatkan mereka yang berilmu pengetahuan tinggi dalam lapisan teratas.⁶

Kebebasan atas segelintir para penguasa inilah yang mendominasi untuk menguasai, memonopoli, dan menghisap kebebasan untuk

⁵ Dwi Lailatul Fajriah, "Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dan Sejarahnya", <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-dan-sejarahny> (25 Desember 2023)

⁶ Harianti, Runi. "*Etika Politik Dalam Negara Demokrasi* ", dalam Jurnal Demokrasi, V.II, No.1, 2003, h. 65-66.

memperdagangkan segala sesuatu demi menumpuk kekayaan individu dan menyingkirkan mayoritas rakyat yang tertindas. Hal inilah yang disebut demokrasi borju istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* artinya rakyat dan *cratein* artinya pemerintah. Secara sederhana, demokrasi berasal pemerintahan oleh rakyat, dalam hal ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Diantara beberapa pengertian tentang demokrasi.⁷

Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Henry B. Moyo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi bahwa demokrasi sebagai sistem politik adalah sistem politik yang merupakan sebuah kebijaksanaan umum yang ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dan pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁸

Demokrasi Borjuis sebagaimana demokrasi rakyat merupakan kelas. Demokrasi borjuis didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, yang terkonsentrasi ditangan sedikit orang saja. Sehingga terjadi ketimpangan sosial di masyarakat, bentuk demokrasi yang memuat cara pandang kelas.⁹

Mayoritas manusia yang tidak memiliki alat produksi serta tidak menguasai modal, akan menjual tenaga dan keahliannya pada kaum

⁷ Aji Samekto, *Mengungkap Relasi Kapitalisme, Demokrasi Dan Globalisasi*, Dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14,No. 2 h. 306.

⁸ Rusadi Kantaparawira, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung ; Sinar Baru Algasindo, 2004), h. 70.

⁹ Nr.Yunus,*Akutansi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*".Dalam Jurnal Sosio Didaktika, Vol.2.,No.2, h.158-159.

modal, jadilah dia buruh. Tenaga dan keahlian para buruh digunakan oleh kaum borjuis untuk menciptakan barang (produksi) dagangan (komoditi). Dari hasil kerja tersebut, si pekerja hanya mendapatkan bagian kecil dan si pemilik modal yang tidak bekerja mendapatkan keuntungan yang besar. Cara kerja seperti itu tidak akan bertahan jika ada Undang-Undang, aturan-aturan, dan kebijakan-kebijakan lain sebagai pendukungnya. Subsidi sosial, pajak impor-ekspor tinggi, prodak UU, kebijakan yang tidak mendukung praktek borjuis, merupakan batu halangan yang harus segera dihilangkan, karena akan meminimalisir keuntungan.¹⁰

Kaum borjuis umumnya hampir menguasai 80% sektor pertanian, perkebunan kelapa dan peternakan sarang walet yang menjadi sumber kekuatan ekonomi yang sangat kuat di wilayah desa Malino. Hal inilah yang menjadikan kaum borjuis memiliki banyak pekerja yang menangani dan mengurus pertanian dan peternakan. Orang-orang yang masuk dalam kategori golongan kaum Borjuis di desa Malino adalah para pengusaha. Status kaum borjuis di lingkungan masyarakat Malino sangat mendominasi hingga memiliki pengaruh yang sangat besar di berbagai aspek sosial tanpa terkecuali perpolitikan desa Malino yang melahirkan kesepakatan dengan calon kepala desa untuk ikut andil dalam memenangkan dalam pemilihan kepala desa Malino. Kaum borjuis sangat mempengaruhi dan mendominasi pemilihan kepala desa di Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala semenjak periode ke 2 dari mulanya berdiri Desa Malino pada tahun 2009 sampai saat ini peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih jauh strategi kaum Borjuis (perbedaan

¹⁰ Asnawi Dan Hartuntik, "*Analisis Historis Terhadap Komunis Sebagai Suatu Idiologi Politik*" Dalam Jurnal Seuneubok Lada, V. 2, No.1, h. 12.

antara kelas).

2. Teori Elit

Menurut Para ilmuwan yang mencetuskan teori elit klasik (Pareto, Mosca, Michels hingga Weber), kekuasaan justru terkonsentrasi di dalam sedikit Kelompok atau individu.¹¹

Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh Sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran-kehadiran mereka pada kekuasaan politik yang penuh. Mereka bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah mereka yang terbaik. merekalah yang mampu menduduki kekuasaan tertinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang yang kaya juga pandai dan mempunyai kelebihan dari masyarakat kebanyakan. Karena itu menurut-nya, masyarakat terdiri dari dua Kelas:

- a. Lapisan atas yaitu elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah (*Governing Elit*) dan elit yang tidak memerintah (*Non Governing Elit*) seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tuan tanah dan Lain sebagainya.
- b. Lapisan yang lebih rendah yaitu non-elit seperti masyarakat pada umumnya, petani dan lain sebagainya.¹²

Dalam kondisi tertentu, ada karakteristik yang membedakan antara elit satu dengan yang lainnya, yaitu kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Apabila kelompok elit yang sedang memimpin kehilangan kecakapannya, sedangkan orang-orang yang berada di luar

¹¹ Vilfredo Pareto dalam bukunya, *The Mind and Society* dikutip dari Botomore, Tom B. *Elite and Society*, New York: Penguin Books Ltd., 1982, h. 7.

¹² Sp Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010), h. 200

kelompok tersebut menunjukkan kecakapannya dalam masyarakat, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelompok elit yang berkuasa saat itu akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas elit yang baru¹³. Artinya bahwa dalam kondisi tertentu posisi sekelompok elit juga dapat kehilangan kredibilitasnya dimata masyarakat sehingga dengan mudah dapat dijatuhkan oleh kelompok baru yang nantinya akan menjadi elit baru dalam masyarakat tersebut.

Robert Putnam¹⁴ mengatakan bahwa ada lima aspek yang berkaitan dengan elit dan kekuasaan politik yaitu:

- a. Kekuasaan politik seperti halnya barang-barang sosial lainnya yang di distribusikan dengan tidak merata.
- b. Pada hakikatnya orang dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka yang tidak memilikinya.
- c. Secara internal, elit bersifat *homogen*, bersatu dan memiliki kesadaran.
- d. Elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya, kemudian keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang terbatas.
- e. Kelompok elit pada hakikatnya bersifat otonom.

Untuk memahami elit pada kondisi tertentu (pemerintahan desa) dan bagaimana suatu keputusan kolektif dalam suatu pemerintahan dilaksanakan secara bersama. Menurut Putnam setidaknya ada tiga model analisis elit yang dapat digunakan:

- a. Analisis posisional yang menempatkan elit berada dalam posisi

¹³ *Ibid*, h. 203.

¹⁴ Syarifuddin Jurdi. *Islamisasi Or Politisasi Islam Di Bima, Final Report Penelitian Kompetitif Individual: Depag RI*. 2010., h. 18-19.

struktural organisasi, mereka itulah yang paling banyak memberi andil dalam masyarakat.

- b. Analisis reputasional yang yang mempunyai pengaruh atas meskipun ia tidak berada dalam memposisikan elit sebagai orang keputusan-keputusan organisasi, Struktur organisasi tersebut atau berada dalam posisi informal dalam masyarakat.
- c. lalah analisa keputusan yang memposisikan elit sebagai orang yang mempunyai pengaruh dalam organisasi sehingga ide-ide dan gagasan pemikirannya menjadi sumber referensi keputusan organisasi. Dengan kata lain, dalam hal ini elit diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif.¹⁵

3. Peran Elit Lokal dalam Bisnis di Desa

Elit adalah konsep didasarkan pada konsep tindakan logis dan tindakan non-logis. Tindakan logis adalah tindakan yang mempunyai arah tujuan. Sedangkan nonlogis yaitu tindakan yang tidak diarahkan kepada suatu tujuan yang jelas. Pareto menjelaskan lebih dalam tentang kepentingan utama dari elite yaitu "residu kombinasi" dan "residu keuletan bersama" yang diartikan dengan kelicikan dan kekejaman. Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa tidak lepas dengan adanya elit yang berada pada struktural pemerintah desa ataupun non-struktural dalam pemerintahan desa. Elit merupakan kumpulan individu atau kelompok kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan dibandingkan masyarakat yang biasanya dan orang yang memiliki kekuasaan dalam sebuah posisi dapada lingkungannya. Elit dalam lingkup desa dapat dikatakan elit lokal ataupun elit setempat seperti para

¹⁵ Syarifuddin Jurdi. *Islamisasi Or Politisasi Islam Di Bima, Final Report Penelitian Kompetitif Individual: Depag RI*. 2010, h. 20.

pengusaha, dan tokoh-tokoh politik maupun tokoh agama dan juga pemilik lahan.¹⁶

Adanya elit dalam suatu masyarakat menurut Keller (1989) adalah karena dalam lingkungannya selalu ada individu-individu yang mempunyai kelebihan dari pada masyarakat lainnya, dan dengan semakin *heterogen* masyarakat maka semakin banyak elit-elit baru yang muncul berdasarkan dimensi kekuasaan yang dimilikinya, dimensi elit sangat bergantung pada basis atau latar belakang munculnya cakupan arena yang dikuasai elit. Kekuasaan elit dapat digunakan untuk tujuan yang baik seperti kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan sebagainya. Namun, juga dapat digunakan untuk keburukan seperti memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu, untuk memperkuat oligarki kekuasaan, korupsi dan lain sebagainya.¹⁷

4. Teori Hegemoni

Teori Hegemoni sesungguhnya adalah kritik terhadap konsep pemikiran yang mereduksi dan menganggap esensi suatu entitas tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, utamanya *reduksionisme* dan *esensialisme* yang melekat pada pemikiran-pemikiran penganut Marxisme dan Non Marxisme. Di kalangan penganut Marxisme telah lama terjadi perdebatan tentang konsep *basic structure* (ekonomi) dan *super structure* (ideologi, politik, pendidikan, budaya, dan sebagainya), dimana tafsiran Marxisme Klasik percaya bahwa struktur dasar ekonomi menentukan

¹⁶ E Syaputra, *kekuasaan Elit Lokal Dalam Upaya Penguatan Badan Usaha Milik Desa Transisi* Edisi 1/2020, h. 13

¹⁷ Syaputra, E. *kekuasaan Elit Lokal Dalam Upaya Penguatan Badan Usaha Milik Desa Transisi* Edisi 1/2020, h. 13

super struktur.¹⁸

Sosialisme oleh kalangan tradisional direduksi menjadi ekonomisme. Perjuangan kelas direduksi menjadi perjuangan kelas ekonomi saja, sehingga hanya menjadi gerakan pekerja semata, dan mengabaikan gerakan lain seperti *civil right movement*, gerakan perempuan, gerakan budaya, lingkungan dan gerakan sosial lainnya. Pemikiran Gramsci membukakan kesadaran tentang gerakan pekerja sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil (*civil society*) dan sebaliknya. Gramsci menyatakan bahwa kelas yang hendak meraih hegemoni dalam masyarakat sipil juga harus meraih kepemimpinan dalam bidang produksi, karena kaum borjuis juga melakukan kontrol yang ketat atas proses produksi, sehingga mereka pun dapat menjadi kelas hegemonik dalam masyarakat sipil dan meraih kekuasaan negara.¹⁹

Dengan demikian, bidang politik (perjuangan meraih kekuasaan negara), tidak bisa dipisahkan dengan bidang ekonomi. Gramsci menggunakan istilah blok historis (*historic bloc*) untuk menunjukkan upaya kelas hegemonik dalam memadukan kepemimpinan atas kekuatan kelompok sosial dalam masyarakat sipil dengan kepemimpinan dalam bidang produksi. Gramsci menyadari bahwa hegemoni kaum borjuis tidak semata-mata berdasarkan daya alam ekonomis dan politiknya, tetapi karena kaum borjuis mampu menciptakan alam pikiran dan sistem nilai yang diyakini oleh masyarakat. Kaum pekerja dan kaum tertindas mau menerima hegemoni kaum borjuis karena mereka menganggapnya wajar

¹⁸ Enda Siswanti, *Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci* Jurnal Translitera Edisi 5/2017

¹⁹ Syaputra, E. kekuasaan Elit Lokal Dalam Upaya Penguatan Badan Usaha Milik Desa Transisi Edisi 1/2020, h. 23-24.

dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya *given*. Ciri khas kekuasaan hegemoni adalah bahwa kekuasaan itu tertanam dalam keyakinan, cita-cita, dan pandangan normatif seluruh masyarakat.²⁰

5. Etika Politik

Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga Negara dan penyelenggara Negara harus mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat, karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai "susila" dan "tidak susila", "baik" dan "buruk", sifat seseorang dikatakan susila atau bijak apabila ia melakukan kebajikan, sebaliknya seseorang dikatakan tidak susila apabila ia melakukan kejahatan.²¹

6. Etika Politik Islam

Etika politik Islam senantiasa merujuk pada ketentuan dalam Al Qur'an dan hadist. Dalam Al Qur'an menyuarakan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat baik serta berlaku amanah. Perinsip dasar dalam etika politik islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghargai

²⁰ Syaputra, E. kekuasaan Elit Lokal Dalam Upaya Penguatan Badan Usaha Milik Desa Transisi Edisi 1/2020. h. 29-30.

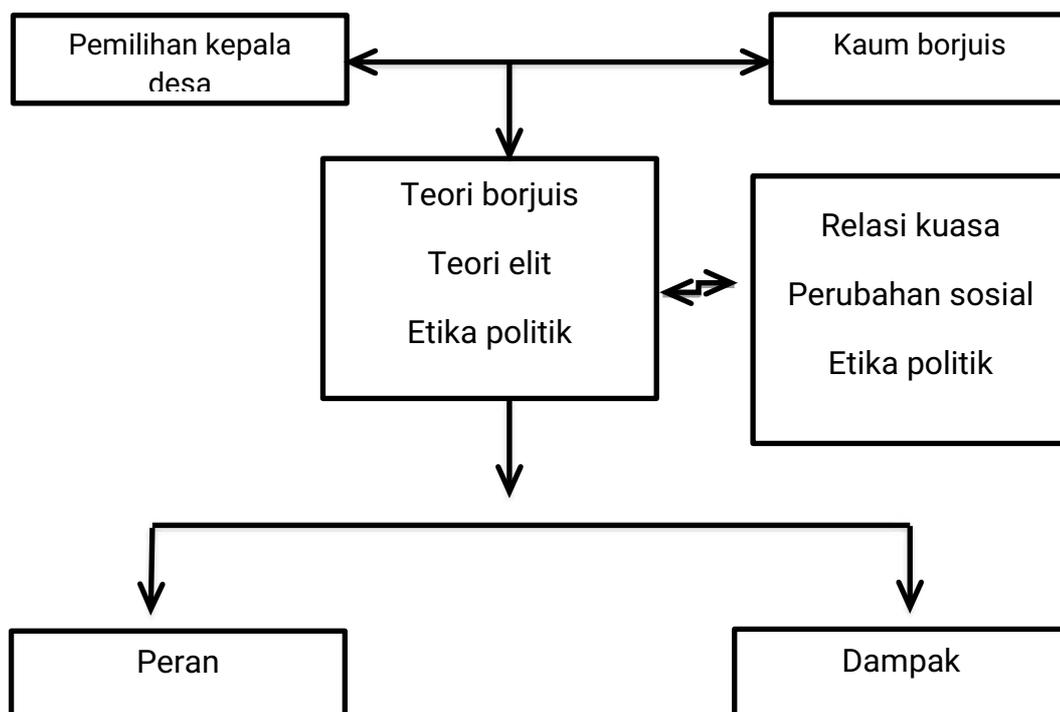
²¹ Hartanti, Firmansyha Putra, *Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia* ., Jusip-Unja, Vol.2, Januari-Juni 2019

hak-hak manusia, sehingga terciptanya suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama. Dan ketika segala aktivitas politik yang dilakukan senantiasa dituntut oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al Qur'an, maka aktivitas yang dilakukan mendapat berkah yang berlipat ganda, sehingga terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena melakukan keterpurukan atau kemungkaran.²²

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang di jadikan sebagai skema pemikiran yang melatar belakangi penelitian ini, dalam kerangka suatu pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran berdasarkan pendapat beberapa ahli.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Olah data 2023 kerangka pemikiran

²² Samuel Junior Mogie *Peran Elit Lokal Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa* Vol. 12 No. 2 (2023)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat.

Dengan demikian penelitian ini berupaya mengumpulkan data-data atau informasi objektif di lapangan mengenai “Peran Kaum Bojuis Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala)”

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Malino. Pemilihan lokasi tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut cukup sesuai dengan lokasi penelitian berdasarkan dengan adanya kaum borjuis yang ingin diteliti dan kondisi perkembangan dengan kebijakan yang diputuskan pemerintah desa berdasarkan hasil observasi peneliti selain itu lokasi penelitian dilakukan di desa kelahiran peneliti untuk memberikan sumbangsi terhadap masyarakat melalui tulisan yang berbentuk sebuah kritikan terhadap kebijakan pemerintah desa.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti yang bersifat kualitatif mengharuskan kehadiran peneliti di lapangan karena dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen. Dalam penelitian ini, penulis merupakan pengamat penuh. Oleh karena itu, peneliti

merupakan instrumen utama dalam proses penelitian sekaligus pengumpulan data.



Adapun posisi peneliti dalam hal ini adalah pengetahuan pihak-pihak tertentu khususnya lokasi yang tidak terkait dengan objek penelitian ini.

Karenanya peneliti mutlak hadir dilapangan atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam melakukan pengumpulan data peneliti berusaha semaksimal mungkin membangun hubungan yang baik dengan para informan kunci yang menjadi sumber data utama peneliti memanfaatkan kedekatan emosional antara peneliti dan lingkungan penelitian yang merupakan tempat kelahiran peneliti .

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari lapangan yang menggunakan teknik wawancara, yang memberikan informasi (informan), kunci seperti tokoh pemuda, tokoh pendidik, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dan narasumber yang berkaitan dengan Analisis Peran Kaum Borjuis Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala)

2. Data sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang di peroleh orang yang di lakukan penelitian dari sumber sumber yang telah ada. Data ini biasanya di peroleh dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu.¹ Adapun yang menjadi data sekunder yang dalam penelitian ini adalah dari bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

¹ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Ideologi Penelitian Dan Aplikasi* (Jakarta: Ghalia, 2002), h. 19.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi yang merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi langsung yakni penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung dengan objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis hubungan dengan apa yang dilihat. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan peneliti letak geografis sangat mempengaruhi hasil observasi yang dilakukan peneliti mengingat Desa Malino adalah tempat kelahiran peneliti dan berdomisili di Desa tersebut yang menguntungkan peneliti dalam melakukan observasi karena peneliti mengenal setiap karakter orang-orang di Desa Malino.

2. Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang dilakukan peneliti dengan berbagai pihak yang terkait sebagai sumber informasi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 224-225.

kecil.³ Adapun pelaksanaannya teknik wawancara yang di gunakan adalah *snow ball sampling* pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung sambil berhadapan antara pewawancara dengan narasumber yang di wawancarai sambil menggunakan pedoman wawancara. Wawancara didapatkan informasi (informan) dari narasumber seperti Kepala Desa, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat Desa Malino. Alasan peneliti memilih narasumber tersebut agar informasi terus berkembang hingga peneliti menemukan titik jenuh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bertujuan agar data yang diperoleh merupakan data yang benar-benar valid. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴ Dokumentasi yang dimaksud disini adalah alat berupa kamera yang di gunakan dalam pengambilan gambar saat penelitian penulis juga menyiapkan alat-alat tulis yang digunakan untuk mencatat informasi hasil wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang

³ Ibid, h. 231.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 240

digunakan dalam penelitian ini yaitu:⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Penulis merangkum beberapa data dan hasil wawancara para informan kunci dilapangan kemudian data-data tersebut dirangkum guna memperoleh data yang penting, pencatatan yang teliti juga di lakukan peneliti guna menjaga data agar tetap valid dan terperinci dengan baik sesuai kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan dengan cara menyusun informasi secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam penelitian ini data berupa kalimat kata, yang berhubungan fokus penelitian secara sistematis dapat ditarik kesimpulan dari temuan penelitian.

3. Verifikasi Data

Yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa data kembali data yang disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan dijamin benar-benar akurat.

G. Pengesahan keabsahan data

Pengecekan keabsahan data Dalam suatu penelitian merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dan sangat penting, sebab data tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan fasilitas kredibilitas yang diperoleh. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah

⁵ Ibid, h. 244

sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi yang artinya teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data. Menurut Sugiyono (2019) maka pelaksanaan teknik dari langkah pengujian keabsahan data triangulasi akan memanfaatkan 3 taktik yaitu :⁶

1. Triangulasi sumber

Cara ini dilakukan dengan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan, yaitu dengan meminta bantuan dengan peneliti lain untuk melakukan pengecekan langsung wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah sama dengan proses replikasi terhadap hasil peneliti yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

2. Triangulasi teknik pengumpulan data

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Cara ini dilakukan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, lalu dicek dengan menggunakan observasi terlibat, dokumentasi tertulis, catatan resmi gambar, atau foto.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilatas data, mengumpulkan data dengan teknik wawancara dilakukan peneliti di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data

⁶ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2013), h. 33.

yang valid sehingga lebih kredibel. Pada pengajuan kredibel data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau menggunakan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Desa Malino*

1. Sejarah Singkat Desa Malino

Desa Malino adalah hasil dari pemekaran Desa Sibayu pada Selasa 12 Oktober 2004. Pemekaran itu dilakukan dengan kesepakatan bahwa desa berbatasan alam yaitu batas sungai, segala aset desa yang berada di wilayah Desa Malino berupa wilayah seluas 1.027 M sudah menjadi milik Desa Malino. Kepala desa dipilih secara musyawarah oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta organisasi yang ada, sehingga diputuskan jabatan kepala desa Malino saat itu diberikan kepada bapak Mustakim Badrun.

Sabtu 1 Oktober 2005 Desa Malino diresmikan menjadi desa definitif oleh Wakil Bupati Donggala Drs Habir Ponulele Pada hari Kamis 8 Oktober 2005 dilaksanakan pemilihan anggota BPD, kemudian BPD menyelenggarakan pemilihan kepala desa (PILKADES) yang diikuti oleh tiga calon kepala desa. Hasil dari pemilihan tersebut di menangkan mustakim badrun selaku kepala desa pertama dengan masa jabatan 1 periode.¹

2. Keadaan Geografis

Desa Malino memiliki Luas Wilayah 1027 M². Jarak dari Ibu Kota Kecamatan 120 km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten 162 km, jarak dari Ibu Kota Provinsi 130 km. dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kambayang Kecamatan Dampelas

¹ Sumber Data: Arsip Desa Malino, 2020.

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Baru
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sibayu



d. Sebelah Barat berbatasan dengan laut selat Makassar

Desa Malino Secara Geografis merupakan salah satu desa dari 13 Desa yang ada di kecamatan Balaesang.

3. Data Penduduk

Jumlah penduduk di desa Malino adalah kurang lebih 1.643 jiwa

Adapun data-data kependudukan yang kami dapatkan yaitu Dari Profil Desa Adalah Sebagai berikut:²

Tabel 4.1 Data Kependudukan Desa

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki – Laki	789 jiwa
2	Perempuan	854 jiwa
Total		1643 Jiwa

(Sumber: Pendataan Profil desa oleh mahasiswa KKN 89, 2020)

4. Potensi Desa Malino

Masyarakat Desa Malino memanfaatkan sumber mata pencaharian, antara lain:

- a. Perkebunan
- b. Perikanan
- c. Peternakan
- d. Pertanian
- e. Pedagang

5. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Bagi masyarakat Desa Malino pendidikan menjadi prioritas dan juga kebutuhan yang harus dipenuhi, namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh sebagian masyarakat karena terkendala masalah ekonomi (biaya). Tingkat

² Sumber: Pendataan Profil desa oleh mahasiswa KKN 89, 2020

Pendidikan masyarakat di Desa Malino tergolong sedang, hal ini terbukti pada jumlah penduduk yang rata-rata hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SD

dan SMA. Sebagian warga yang sudah menempuh pendidikan SMA memilih mencari pekerjaan dan sebagian memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

6. Keadaan Sosial

Desa Malino pada umumnya dihuni oleh suku pendau, yang merupakan penduduk asli, adapun suku-suku lain yang tinggal dan menetap yaitu suku Dampelas, Bugis dan Jawa. Masyarakat Desa Malino sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dan sifat kekeluargaan yang sangat erat. Masyarakat Desa Malino sering berinteraksi dengan alamnya sehingga hampir seluruh masyarakat dalam kesehariannya melakukan aktivitas seperti berkebun, berternak, nelayan, bertani, dan berdagang.

7. Organisasi Sosial

Masyarakat desa Malino memiliki beberapa organisasi sosial yang aktif diantaranya Ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), Majelis Ta'lim, Risma, PHBI (panitia pelaksanaan hari besar islam), Pemeliharaan Pembinaan Hansip, dan Dasa Wisma.

8. Kebudayaan

Masyarakat desa Malino memiliki kebudayaan suku pendau yang sangat tinggi, dilihat dari partisipasi masyarakat dalam membantu menyelesaikan beberapa program kerja dan kegiatan lainnya, dan juga masyarakat di desa Malino mudah berbaur dengan masyarakat pendatang.

B. Temuan Hasil Penelitian

1. Daftar Narasumber

Berdasarkan hasil penelitian di bawah ini merupakan daftar narasumber yang di wawancarai oleh peneliti ketika mengumpulkan informasi mengenai peran kaum borjuis dalam proses pemilihan kepala desa (studi kasus desa Malino kecamatan Balaesang kabupaten Donggala)

Tabel 4.2 Daftar Narasumber

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Status Sosial	TTD
1.	Rahmat	40 tahun	Laki-Laki	Tokoh Pendidik	
2.	Kasmian	52 tahun	Laki-Laki	Tokoh Masyarakat	
3.	Wiranto	27 tahun	Laki-Laki	Tokoh Pemuda	
4.	Jahidin	40 tahun	Laki-Laki	Tokoh Masyarakat	
5.	Taking	48 tahun	Laki-Laki	Ketua Adat	
6.	Masrun	47 tahun	Laki-Laki	Tokoh Masyarakat	

2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di desa Malino. Dimana daftar pemilih tetap selama 3 kali pemilihan diantaranya sebagai berikut: di tahun 2006 jumlah daftar pemilih tetapnya adalah sejumlah 472 yang terdiri dari 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 251 orang berjenis kelamin perempuan. Di tahun 2012 jumlah pemilih tetapnya adalah sejumlah 621 yang terdiri dari 299 orang berjenis laki-laki dan 322 orang berjenis perempuan. Di tahun 2019

jumlah pemilih tetapnya adalah sejumlah 941 yang terdiri dari 448 orang yang berjenis laki-laki dan 493 orang yang berjenis perempuan. Penjelasan di atas merupakan jumlah dari (DPT) desa malino mulai dari tahun pertama 2006 pertama kali di laksanakan pemilihan kepala desa malino sampai tahun 2019 yang merupakan pemilihan ke 3. Di tahun 2023 jumlah pemilih tetapnya adalah sejumlah 61 orang terdiri dari 40 orang berjenis laki-laki dan 21 orang berjenis perempuan penjelasan di atas merupakan jumlah dari (DPT) Desa Malino tahun 2023 yang merupakan pemilihan kepala Desa antarwaktu.³

Tabel 4.3 Daftar Pemilih Tetap Tahun 2006, 2012, 2019 dan 2023

DPT Berdasarkan Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2006	221	251	472
2012	299	322	621
2019	448	493	941
2023	40	21	61

Sumber: Arsip Desa Malino

3. Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Pertama

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mendapatkan jumlah perhitungan suara hasil pemilihan kepala desa Malino yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2006 dimana pada pemilihan kepala desa ini terdapat 3 kandidat calon kepala desa Malino dengan total keseluruhan jumlah suara 472 suara diantaranya Bahrin S. Dengan 50 suara, Mustakim Badrun dengan 401 suara dan Arwin S. dengan 19 suara serta 2 suara tidak sah. Dari hasil pemilihan kepala desa ini maka kandidat yang berhasil mendapatkan suara terbanyaklah yang menjadi kepala desa

³ Sumber Data: Arsip Desa Malino, 2020.

dalam hal ini yang bapak Mustakim Badrun berhasil mengungguli dua kandidat lainnya dengan selisih suara yang jauh telak dan kemudian di lantik pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2006.⁴

Tabel 4.4 Perhitungan Hasil Suara Tahun 2006

No.	Nama Kandidat Calon Kepala Desa	Jumlah Suara		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	
1.	Bahrin S.	50	2	
2.	Mustakim Badrun	401		
3.	Arwin Y.	19		
Jumlah		470	2	

Sumber: Arsip Desa Malino

Berdasarkan hasil observasi yang telah di lakukan peneliti di lapangan terkait dengan pemilihan kepala desa pertama kali yang berhubungan dengan kaum borjuis sebagaimana wawancara yang dilakukan:

“Bahwa pada pemilihan tahun 2006 tidak dapat di pungkiri bahwa keikutsertaan kaum borjuis sangat nampak jelas terlihat dari perolehan suara yang didominasi oleh salah satu calon kepala desa yang terpilih. Dengan perolehan suara yang nyaris menguasai keseluruhan suara dari para pemilih dan menang di 4 dusun hal ini tidak terlepas dari keikutsertaan kaum borjuis yang menjadikan para pekerjanya sebagai tim pemenangan di setiap dusunnya.”⁵

Kesimpulan yang peneliti dapat dari informan sangat jelas

⁴ Sumber: Arsip Desa Malino, 2020.

⁵ Taling, Ketua Adat “Wawancara” di Kediaman Ketua Adat, 2023.

menggambarkan peranan yang dimainkan oleh para kaum borjuis. Para kaum borjuis memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap para pemilih dengan menjadikan buruh yang dimilikinya sebagai tim sukses yang ditempatkan di 4 dusun seakan menggambarkan bahwa pemilihan tersebut telah dipetakan. Para kaum borjuis mendukung calon kepala desa yang menjadi jagoannya dengan cara menjadikan para pekerja yang bekerja pada kaum borjuis tersebut ambil andil sebagai tim sukses calon kepala desa tersebut.

4. Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Kedua

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mendapatkan jumlah perhitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa Malino yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 dimana pada pemilihan kepala desa ini terdapat 4 kandidat calon Kepala Desa Malino dengan total keseluruhan jumlah suara 614 suara diantaranya Masudin dengan 47 suara, Bahrin S. Dengan 95 suara, Alber dengan 152 suara dan Mustakim Badrun dengan 320 suara serta 7 suara yang batal atau tidak sah. Dari hasil pemilihan kepala desa ini maka kandidat yang berhasil mendapatkan suara terbanyaklah yang menjadi kepala desa dalam hal ini bapak Mustakim Badrun berhasil mengungguli dua kandidat lainnya dengan selisih suara yang jauh telak dan di lantik pada hari Selasa tanggal 18 September 2012.

Tabel 4.5 Perhitungan Hasil Suara Tahun 2012

No.	Nama Kandidat Calon Kepala Desa	Jumlah Suara		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	
1.	Masudin	47	7	
2.	Bahrin S.	95		

3.	Alber	152	
3.	Mustakim Badrun	320	
Jumlah		614	7

Sumber: Arsip Desa Malino

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa peneliti mendapatkan informasi dari narasumber terkait pemilihan kepala desa kedua mengenai peranan kaum borjuis sebagaimana wawancara yang dilakukan:

“Kaum borjuis bukan lagi fenomena baru dalam urusan campur tangan dalam urusan dunia perpolitikan. Hal ini tidak terlalu menonjol dikarenakan mereka mengendalikan dari kejauhan atau dari balik layar. Hal ini dapat dilihat dari orang-orang yang menjadi tim sukses dari salah satu calon kepala desa. Hampir dapat dipastikan orang-orang tersebut merupakan pekerja dari kaum borjuis. Mereka memiliki peranan dalam membagikan sembako dadakan atau yang umumnya dikenal masyarakat sebagai serangan fajar dan bahkan sebagian ada yang mendapatkan uang saku.”⁶

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penjelasan narasumber bahwa kaum borjuis berperan dari balik layar untuk mengendalikan pemilihan dengan memanfaatkan para pekerjanya dan kekuatan modal yang dimilikinya sebagai sumber kekuatan utama dalam memenangkan pemilihan. Dimana kaum borjuis ini berperan sebagai orang yang mendanai untuk melakukan serangan fajar ke rumah-rumah warga yaitu berupa membagikan sembako hingga memberikan masyarakat uang saku.

5. Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mendapatkan jumlah

⁶ Jahidin, Selaku Masyarakat “Wawancara” di Kediaman, 2023.

perhitungan suara hasil pemilihan kepala Desa Malino yang ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 dimana pada pemilihan kepala desa ini terdapat 4 kandidat calon kepala desa Malino dengan total keseluruhan daftar pemilih tetap (DPT) yaitu sebanyak 941 akan tetapi hanya sebanyak 802 orang yang memilih dan sebanyak 139 tidak memilih. Dari jumlah suara sebanyak 802 suara diantaranya Suparman dengan 38 suara, Irfan Dengan 276 suara, Yusran B. dengan 217 suara dan Ishak dengan 265 suara serta 6 suara yang batal atau tidak sah. Dari hasil pemilihan kepala desa ini maka kandidat yang berhasil mendapatkan suara terbanyaklah yang menjadi kepala desa dalam hal ini bapak Irfan berhasil mengungguli dua kandidat lainnya dengan selisih suara yang tidak terlalu jauh dan di lantik pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019.

Tabel 4.6 Perhitungan Hasil Suara Tahun 2019

No.	Nama Kandidat Calon Kepala Desa	Jumlah Suara		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Sah
1.	Suparman	38	6	
2.	Irfan	276		
3.	Yusran B.	217		
3.	Ishak	265		
Jumlah		796	6	

Sumber: Arsip Desa Malino

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa peneliti mendapatkan informasi dari narasumber terkait pemilihan kepala desa sebagaimana wawancara yang dilakukan:

“Saya peduli dengan adanya pesta demokrasi pemilihan kepala desa. Dimana wajib setiap warga negara Indonesia memiliki hak pilih, siapapun yang mereka pilih sesuai dengan hati nurani diri

sendiri tanpa unsur paksaan kepada orang lain bahkan anggota keluarga sendiri.”⁷

Kesimpulan yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan narasumber tersebut bahwa tidak semua masyarakat merebut hak pilih keluarganya sendiri bahkan orang lain demi keegoisan pribadi.

Lalu, menurut hasil observasi wawancara yang penulis ambil dari wiranto selaku tokoh pemuda Desa Malino:

“Pada pemilihan kepala desa saya melihat adanya fenomena yang menurut saya tampak aneh dimana menjelang pemilihan kepala desa tepatnya 1 minggu menjelang diadakan pemungutan suara saya melihat banyak bantuan yang mulai berdatangan menuju rumah-rumah warga hal tersebut menurut saya sah-sah saja, namun saya mulai menaruh curiga saat saya melihat secara langsung penyaluran bantuan berupa sembako, rokok, gula dan kopi itu dibagikan saat malam hari setelah saya menanyakan pada penerima bantuan sembako tersebut beliau mengatakan bahwa bantuan tersebut berasal dari salah satu calon kepala desa dengan mengatasnamakan sedekah. Dan saya juga menendengar dari beberapa pemuda mereka juga tak luput dari sasaran pembagian sedekah dari tim sukses salah satu calon kepala desa tapi bukan berupa sembako melainkan bantuan berupa uang tunai”.⁸

Lalu, menurut hasil observasi wawancara yang penulis ambil dari penuturan aslianto selaku tokoh pemuda desa Malino bahwa dalam pemilihan kepala desa Malino banyak di warnai dengan hal-hal yang

⁷ Kasmian Selaku Tokoh Masyarakat, “Wawancara” di Kediaman Tokoh Masyarakat, 2023.

⁸ Wiranto Selaku Tokoh Pemuda “Wawancara” di Kediaman Tokoh Pemuda, 2023.

menarik untuk di bahas:

"Saya melihat antusias dari para pendukung calon kepala desa yang nampak begitu fanatik dimana saya melihat beberapa orang pendukung terlibat dalam taruhan sejumlah uang. Hal ini tak lepas dari pandangan mereka bahwa calon kepala desa yang mereka dukung akan dengan mudah menang dalam pemilihan kepala desa. Saya melihat hal ini di karenakan adanya keterlibatan kaum borjuis yang menjadi pelopor besar dalam pembiayaan kampanye, penjaringan masa, dan tentunya dengan kekuatan modal dalam melakukan bom uang pada para pemilih baik itu dari basis masa mereka maupun basis masa dari calon lain. Mereka melakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.⁹

Kesimpulan yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan narasumber selaku tokoh pemuda yang berada di desa malino peneliti menyimpulkan bahwa peranan yang dimainkan oleh kaum borjuis dalam mendanai calon kepala desa sangat luar biasa dengan mengandalkan kekuatan ekonomi yang dimilikinya sebagai basis utama dalam menjalankan strategi dengan menelusuri sebagian rumah masyarakat untuk membagikan sembako dan bahkan sebagian pemuda juga tak luput dari sasaran para tim sukses dengan memberikan sejumlah uang dengan besar harapan mereka dapat memilih calon kepala desa yang sudah ditentukan.

6. Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Keempat (Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu)

⁹ Jahidin Selaku Tokoh Pemuda "Wawancara" di Kediaman Tokoh Pemuda, 2024.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mendapatkan jumlah perhitungan suara hasil pemilihan kepala desa Malino yang keempat yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2023 dimana pada pemilihan kepala desa ini terdapat 3 kandidat calon kepala desa Malino dengan total keseluruhan jumlah suara 61 suara diantaranya Masudin Dengan 0 suara, Yusran Badrun dengan 25 suara dan Ishak S.Pd dengan 35 Suara serta 1 suara tidak sah. Dari hasil pemilihan kepala desa ini maka kandidat yang berhasil mendapatkan suara terbanyaklah yang menjadi kepala desa dalam hal ini bapak Ishak, S.Pd berhasil mengungguli dua kandidat lainnya dengan selisih suara yang jauh telak dan kemudian di lantik pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023.¹⁰

Tabel 4.7 Perhitungan Hasil Suara Tahun 2023

No.	Nama Kandidat Calon Kepala Desa	Jumlah Suara		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Sah
1.	Masudin	0	1	
2.	Yusran Badrun	25		
3.	Ishak, S.Pd	35		
Jumlah		60	1	

Sumber: Arsip Desa Malino

Pemilihan kepala desa antar waktu ini dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yaitu, UU No.6 Tahun 2014 pasal 47 terkait pemberhentian Kepala Desa yang masa jabatannya lebih dari 1 tahun. Badan permusyawaratan Desa melaksanakan musyawarah khusus pembentukan pilkades antar waktu mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 pemilihan Kepala Desa antar waktu. Pasal 45

¹⁰ Sumber: Arsip Desa Malino, 2020.

Musyawarah Desa yang di laksanakan Khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu di laksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan, terhitung sejak Kepala Desa di berhentikan atau meninggal dunia.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa peneliti mendapatkan informasi dari narasumber terkait pemilihan kepala desa sebagaimana wawancara yang dilakukan:

“Pemilihan Kepala Desa tahun ini sedikit berbeda dari pemilihan Kepala Desa sebelumnya karena tidak melibatkan keseluruhan masyarakat untuk ikut memilih melainkan perwakilan dari para tokoh di tiap dusunnya. Saya melihat dari ke 3 calon Kepala Desa memiliki persiapan yang begitu matang terlihat dari tiap tim suksesnya masing-masing. saya melihat salah satu dari tim sukses itu membagikan bibit durian kepada beberapa masyarakat yang di tokohkan di desa bahkan dari beberapa teman saya mengaku menerima sejumlah uang dan beberapa bungkus rokok dengan harapan mereka bisa menjaring suara dan simpati saya bersyukur karena calon yang menurut saya melakukan kecurangan itu tidak terpilih. Mereka mendapatkan sokongan yang luar biasa dari pengusaha untuk membiayai dan memberikan bibit durian sebagai alat kampanye.”¹¹

Kesimpulan yang peneliti dapat dari narasumber selaku tim sukses dari calon kepala desa yang terpilih peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi objek dalam praktek kecurangan dalam pemilihan kepala desa bukan hanya masyarakat umum melainkan para tokoh juga tidak luput dari

¹¹ Masrun, Selaku Masyarakat “Wawancara” di Kediaman, 2023.

target dari para oknum tim sukses yang nakal. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya kepentingan pribadi melainkan kepentingan kelompok, kaum borjuis memiliki peranan besar untuk menyokong calon kepala dengan dengan membiayai dan memfasilitasi calon kepala desa untuk memenangkan pemilihan.

C. Pembahasan

1. Proses Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa di atur dalam peraturan menteri dalam Negri Nomor 122 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 122 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221)

Pemilihan kepala desa adalah pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak zaman dahulu. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa

dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat. Proses kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu sebagai berikut:

a. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa dalam wilayah Kabupaten. Penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa di desa Malino dilaksanakan pada saat masa jabatan kepala desa akan memasuki masa akhir jabatan. Tahapan yang pertama yaitu musyawarah untuk menentukan siapa saja yang bisa dan memenuhi syarat secara administratif untuk dicalonkan menjadi kepala desa. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut diserahkan kepada kepala desa yang masih menjabat dan selanjutnya diserahkan kepada BPD (Badan Perwakilan Desa) untuk dilaksanakan pemilihan kepala desa. Syarat mengikuti penjaringan bakal calon:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat pada pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD)

1945.

- 3) SK KKB/SKCK
- 4) Pendidikan sekurang-kurangnya sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat.
- 5) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
- 6) Sehat jasmani dan rohani.
- 7) Surat keterangan kesehatan dari dokter.
- 8) Keterangan tidak pernah dihukum dari pengadilan.
- 9) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- 10) Penduduk daerah setempat dan warga desa.
- 11) Bersedia dicalonkan.
- 12) Memenuhi syarat lainnya yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan daerah.¹²

Dalam pandangan Islam sangatlah berbeda, persyaratan yang diuraikan tersebut lebih banyak kedalam aspek administrasi bukan pada kemampuan seseorang sebagai pemimpin. Selain itu penjurangan bakal calon sering kali mengabaikan prinsip-prinsip akhlak sebagai pemimpin.

Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan

Sesuai dengan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 telah di atur mengenai tata cara pemilihan kepala Desa. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut dan dengan akan berakhirnya masa kepemimpinan kepala desa maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan serangkaian tindakan administratif untuk mempersiapkan proses pemilihan kepala desa di masing-masing Desa. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan

¹² Haw Widjaja, Otonom Daerah Dan Daerah Otonomi Edisi, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), 270.

tersebut, BPD membentuk dan menetapkan panitia pemilihan kepala Desa, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkan surat keputusan (SK) BPD. Kemudian BPD melaporkan nama-nama panitia pemilihan yang telah terbentuk dan ditetapkan kepada bupati melalui camat.

b. Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Tetap

Setelah panitia pemilihan terbentuk dan ditetapkan oleh BPD, dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) BPD maka dengan berdasarkan SK tersebut panitia pemilihan tidak lagi melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan karena penjaringan dan penyaringan bakal calon sudah dilakukan pada saat musyawarah. Adapun proses yang dikerjakan oleh panitia pemilihan adalah sebagai berikut:

- 1) Bakal calon kepala desa yang namanya telah ditentukan dalam musyawarah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan, dan langsung ditetapkan lolos penjaringan sebagai bakal calon kepala desa yang disertai dengan kelengkapan berkas permohonan berserta lampirannya
- 2) Berkenaan dengan berkas permohonan bakal calon, panitia pemilihan tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan administrasi. Karena sudah diperiksa dan diteliti ketika sebelum dilakukannya musyawarah.

Kemudian panitia pemilihan menetapkan sebagai calon tetap yang akan mengikuti pemilihan kepala desa secara langsung. Hasil penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan bakal calon kemudian diumumkan kepada masyarakat desa pada papan pengumuman dan tempat-tempat strategis secara terbuka. Selanjutnya hasil penelitian pemeriksaan

kemudian ditetapkan oleh BPD dengan dikeluarkan (SK) BPD tentang penetapan calon tetap yang berhak dipilih dan kemudian dilaporkan kepada tim pengarah dan pengawas pilkades tingkat kabupaten.

c. Pencacahan dan Penetapan Hak Pilih

Panitia pemilihan menetapkan daftar hak pilih tetap pemilihan kepala desa setelah sebelumnya diadakan pencacahn hak pilih sementara dan hak pilih tambahan oleh Sebelas (11) orang pencacah dari panitia pemilihan di setiap dusun. Pencacahan ini dilakukan kurang lebih 3 hari serta melibatkan beberapa saksi.

d. Sosialisasi atau Kampanye

Pemilihan kepala desa ini sebagaimana layaknya dalam pemilihan kepala desa, bahwa dalam proses pemilihan selalu menggunakan kampanye sebagai sarana dan prasarana untuk menyaring suara pemilih. Di antara bentuk-bentuk kampanye yang dapat digunakan sebagai alat untuk merekrut suara adalah dengan cara mengadakan pertemuan terbatas, tatap muka dan diselingi dengan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, serta mengadakan rapat umum. Kampanye merupakan tahapan akhir dalam proses pemilihan kepala desa, dimana masing- masing calon menyampaikan visi dan misinya. Penyampaian visi dan misi calon kepala desa di desa Malino dilakukan di balai desa setempat.

Penyampaian visi dan misi serta program kerja ini merupakan tahapan-tahapan akhir kampanye, terhitung dari tahap akhir kampanye adalah masa tenang sehingga masing-masing calon diminta mencopot baleho dan tanda gambar. Adapun beberapa masyarakat yang mengalami ketegangan-ketegangan dalam kampanye pemilihan kepala desa (Pilkades)

diantaranya disebabkan dari kesalahpahaman dari pemilih itu sendiri, masalah kampanye dalam persepektif Islam memang tidak diatur secara mudah tetapi menjadi titik tekan yaitu apapun bentuknya setiap kecurangan yang dapat memecah belah persatuan umat merupakan pelanggaran atas hukum-hukum Allah. Jelas sekali terlihat kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap hasil pemilihan, jika dianggap tidak sesuai dengan aturan maka sebagian masyarakat akan bersikap tidak loyal yang berujung pada ketidaktaatan kepada seorang pemimpin. Sebaliknya dalam pandangan Islam seleksi dalam pemilihan merupakan sunatullah, apabila dilandasi dengan semangat kebersamaan dalam membangun untuk kemakmuran bersama. Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Penetapan Calon Terpilih

Pada hari dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan kepala desa berjalan dengan baik dan aman tanpa kendala yang berarti. Berdasarkan perhitungan yang disaksikan oleh saksi, BPD, panitia pemilihan, tim pengarah dan pengawas kecamatan dan kabupaten serta para calon tetap dan dengan ditetapkannya calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan, maka proses pemilihan kepala desa Malino telah dilaksanakan dan berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara itu di desa lain banyak terjadi pemilihan kepala desa yang diulang pelaksanaannya dikarenakan terjadinya kecurangan dikarenakan ada calon yang melanggar ketentuan perundang-undangan misalnya politik uang dan pemilihan ganda yang mana pelanggaran ini diperotes oleh calon yang lain sehingga berakibat pada dilakukannya pemilihan ulang.

e. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Tahap akhir pemilihan kepala desa adalah pelaporan, baik itu pelaporan dalam pelaksanaannya maupun pelaporan mengenai calon terpilih dalam pemungutan suara. Panitia pemilihan di akhir kegiatannya melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD secara lengkap untuk menjadi bahan evaluasi. Selain itu panitia pemilihan juga melaporkan calon terpilih kepada BPD beserta kelengkapan administrasi dan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan, kemudian BPD menindak lanjuti pelaporan dari panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

2. Peran Kaum Borjuis dalam Pemilihan Kepala Desa

a. Kaum Borjuis Berperan dalam Kampanye

Tim sukses merupakan sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan masing-masing calon kandidat yang diusungnya. Kampanye merupakan kegiatan mempersuasif pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Pilkades sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan demokrasi. Para calon kepala desa yang ikut serta tentunya memiliki cara kampanye yang berbeda-beda.

Kegiatan kampanye merupakan kerja sama tim. Dengan demikian banyak personil juga lembaga dan pihak yang diluar lembaga desa yang akan terlibat di dalamnya seperti salah satunya adalah kaum borjuis yang menjadikan buruh yang dimilikinya menjadi tim sukses untuk menjadi Penentuan siapa saja yang akan terlibat sebagai pelaksana kampanye merupakan langkah awal dalam melaksanakan kampanye. Kampanye yang merupakan sarana untuk pencapaian cita-cita politik. Strategi menjadi sangat penting guna pemenangan calon Kepala Desa serta cita-

cita yang diinginkan oleh calon Kepala Desa.

Dalam berkampanye dihimbau untuk para calon Kepala desa untuk tidak melakukan *black campaign* atau money politik dan untuk masyarakat juga di himbau supaya jangan menerima uang untuk mencoblos salah satu calon. Pemimpin tidak bisa memaksakan kehendaknya agar orang mengikuti keinginannya. Sebaliknya seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang yang dipimpinnya melalui perkataan dan perbuatannya (keteladanan) agar orang yang dipimpin mengikutinya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mendapatkan informasi dari narasumber mengenai peran kaum borjuis dalam kampanye sebagaimana wawancara yang dilakukan:

“Saya menggunakan hak pilih saya dengan sebaik mungkin agar dapat melihat kemajuan di desa malino selama periode masa jabatan. Saya juga memperhatikan perkembangan perpolitikan yang ada di desa malino terkhusus perhatian saya lebih banyak melirik pergerakan tim sukses dari setiap calon kepala desa saya menemukan kejanggalan dalam berkampanye seperti kegiatan kampanye secara diam-diam dan menjadikan uang dan bahan pangan sebagai alat kampanye untuk menarik simpati masrakat terhadap salah satu calon kepala desa, tentunya hal ini sangat bertengan dengan seruan kampanye yang transparan dan bersih.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada narasumber kaum borjuis dapat disimpulkan bahwa dalam berkampanye tidak sesuai dengan himbuan yang diberikan untuk tidak menerima sogokan. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan masih ada oknum-oknum yang menerima

¹³ Jahidin, Selaku Masyarakat “Wawancara” di Kediaman, 2023.

sogokan dari para kandidat calon kepala desa seperti money politik berupa sogokan uang dan sembako. Selain itu masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dengan nasib mereka kedepannya seperti apa dan bagai mana setelah mereka menerima sogokan, yang secara tidak langsung mereka menjual hak bersuara kepada pemangku kebijakan yang akhirnya terpilih sebagai menjadi kepala desa. Tentunya hal seperti ini sangat mencederai wajah perpolitikan yang ada di Indonesia.

b. Kaum Borjuis Berperan Sebagai Kekuatan Modal

Modal merupakan suatu kekuatan besar yang sangat mempengaruhi dan mendominasi dalam menghiasi jalan pilkades. Kekuatan modal merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi calon kepala desa dalam pembiayaan semasa kampanye dan membiayai orang-orang menjadi tim sukses ataupun para simpatisan yang berusaha untuk menjadikannya pemimpin. Tidak dapat di pungkiri lagi bahwa kekuatan modal atau kekayaan yang dimiliki seseorang memiliki dampak yang sangat besar dalam mempengaruhi seseorang maupun lingkungannya. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mendapatkan informasi dari narasumber mengenai peran kaum borjuis sebagai kekuatan modal sebagaimana wawancara yang dilakukan:

“Melihat sekilas pun kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang mendominasi perekonomian dalam satu desa pastinya akan mendominasi dan mampu melakukan monopoli dalam bidang perekonomian dan ruang lingkup perpolitikan hal ini tentunya tidak gratis apa lagi sampai rela merogok kocek hanya untuk membiayai kampanye orang lain yang tentunya mungkin sudah memiliki

perjanjian di awal dan akan di tepati apabila terpilih nantinya.”¹⁴

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti mengambil kesimpulan bahwa kaum borjuis mempunyai peranan dalam memenangkan calon kepala desa. Dominasi dalam bidang perekonomian sangat berpengaruh dalam membiayai jalannya kampanye secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dengan tujuan memenangkan pemilihan. Kemampuan ekonomi seorang borjuis mendukung calon kepala desa juga menjadi pertimbangan dalam pencalonan, menjadi kepala desa tidak cukup dengan modal kemampuan dalam bidang politik saja melainkan juga memiliki kemampuan secara ekonomi. Dengan adanya penguasaan sumber-sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki segelintir orang menunjukkan kelas mereka sangat mempengaruhi masyarakat. maka mudah bagi mereka untuk memperoleh simpati atau dukungan dari masyarakat setempat untuk mencapai suatu tujuan atau kemenangan.

c. Kaum Borjuis Berperan Sebagai Kekuatan Jaringan

Ikatan soaial seseorang dengan orang lain maupun dengan kelompok merupakan keuntungan untuk membangun relasi dan memperluas cakupan sosial hingga mempermudah seseorang dalam mengamati pola kehidupan orang lain maupun lingkungannya. Membangun Jaringan politik dengan kaum borjuis di sebabkan adanya unsur relasi penguasa dengan satu jaringan tersebut yang melihat pada perspektif kepentingan. Kepentingan adalah salah satu kunci dalam membentuk sebuah relasi menuju sebuah pertukaran sosial dalam membangun jaringan kekuasaan.

Strategi merupakan cara yang dilakukan untuk memenangkan apa

¹⁴ Rahmat S.Pd. Selaku Masyarakat, “Wawancara” di Kediaman, 2023.

yang akan dimiliki atau yang dikehendakinya. Berbagai cara digunakan ketika kita menghendaki apa yang kita inginkan, cara yang ditempuh bermacam-macam. Calon kepala desa tentunya akan memanfaatkan relasi yang telah dibangun dengan tujuan untuk memenangkan pemilihan kepala desa dengan pemanfaatan jaringan sosial yang terstruktur melalui kaum borjuis yang mendominasi dari segi perekonomian dan pertanian. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mendapatkan informasi dari narasumber sebagaimana wawancara yang dilakukan:

“Salah satu pengusaha yang ada di desa Malino dengan basis kekuatan ekonomi yang mendominasi sektor pertanian dan peternakan sarang walet tentunya akan memiliki nilai positif tersendiri di mata masyarakat apa lagi ditambah lagi dia memiliki banyak karyawan yang tentunya akan mengikuti apa perkataan bosnya. Tentunya hal ini lah yang menjadi acuan bagi calon kepala desa untuk membangun relasi dengan kaum borjuis, dengan harapan dapat membantunya untuk memenangkan pemilihan dan bisa saja di antara mereka ada perjanjian tertentu yang nantinya dapat menguntungkan kaum borjuis dalam mengembangkan usahanya di desa Malino. Hal ini dapat kita lihat beberapa bulan sebelumnya di mana aktivitas pengambilan kerikil yang dilakukan oleh salah satu pengusaha yang mana aktivitas tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat dusun 1 tentang aktivitas pengambilan kerikil yang berdampak membuat air keruh dan mencemari sumber air minum masyarakat dusun 1 yang berujung pengusiran oleh warga dan memberhentikan secara paksa.”¹⁵

¹⁵ Kasmian Selaku Tokoh Masyarakat, “Wawancara” di Kediaman Tokoh Masyarakat, 2023.

Maurer menyebutkan tentang birokrasi desa, ia menyebutkan bahwa nepotisme tersebar luas di pedesaan. Praktek kewarisan dan juga munculnya “dinasti lokal” pada birokrat desa yang memonopoli berbagai kedudukan dalam urusan pengelolaan masyarakat. jabatan-jabatan penting di desa biasanya dipegang oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan kepala desa. Terbukti dengan adanya jabatan kepala desa yang dimulai dari Pemerintahan, Kaur Kesra, Badan pemerintahan desa, dan Kaur Umum yang masih memiliki hubungan kekerabatan.

3. Dampak Positif dan Negatif dari Peran Kaum Borjuis dalam Pemilihan Kepala Desa Malino

Dampak positif dalam pemilihan kepala desa sendiri antara lain:

a. Bertambahnya Solidaritas Internal dalam Kelompok

Solidaritas merupakan alat yang seharusnya dijadikan anggota masyarakat sebagai alat untuk mempersatukan persaudaraan antar anggota dalam suatu kelompok kaum borjuis yang ada di masyarakat. Dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa menciptakan solidaritas lebih bisa mengerti keadaan sesama dalam suatu kelompok kaum borjuis, selain itu mereka juga bisa saling tolong-menolong antara anggota kelompok. Akibat dari pelaksanaan pemilihan kepala desa didalam suatu kelompok kaum borjuis yang memiliki tujuan yang sama menjadikan para anggota kelompok menjadi aktif dalam berinteraksi guna mendiskusikan atau menyusun strategi untuk memenangkan pasangan kandidat calon yang menjadi dukungan kelompok kaum borjuis tersebut.

b. Mengubah Perilaku Pasif Menjadi Aktif

Disisi lain dampak positif dari pemilihan kepala desa ialah

mengubah perilaku pasif menjadi aktif, hal tersebut diakibatkan adanya kesadaran individu dari kaum borjuis untuk aktif terlibat dalam pemilihan kepala desa. Kemudian, indikator lain yang menyebabkan setiap individu suatu kaum borjuis ialah adanya justifikasi dari pihak keluarga kepada individu tersebut bahwasanya belum dikategorikan layak ikut berpartisipasi dalam berpolitik dalam pemilihan kepala desa. Hal itulah yang menjadikannya berubah menjadi individu kaum borjuis yang aktif mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa tersebut demi tujuan yang ingin dicapai baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Dampak negatif dalam pemilihan kepala desa sendiri antara lain:

a. Terjadinya Pemaksaan Hak Untuk Memilih Kandidat Calon Kepala Desa

Bentuk pemaksaan yang terjadi dalam pemilihan kepala desa yaitu dimana suatu kaum borjuis memaksakan para anggota yang bekerja kepadanya untuk memilih kandidat calon kepala desa yang menjadi pilihannya. Kondisi ini membuat para anggota dari kaum borjuis tersebut merasa tertekan atas perilaku atasannya tersebut karena kebebasan untuk memilih kandidat calon kepala desa diatur harus sesuai dengan perintah dari atasannya. Pemaksaan pilihan dalam memilih kandidat calon kepala desa juga diakibatkan adanya *money* politik yang terjadi yang biasanya dengan cara memberikan uang atau sembako untuk mendapatkan suara.

b. Terjadinya Konflik

Konflik adalah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai, dimana kekalahan dan kehancuran dipihak lawan merupakan tujuan utama

yang ingin mereka capai. Konflik yang terjadi antar kelompok kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa adalah perbedaan pilihan dalam memilih kandidat calon kepala desa. Kemudian konflik tersebut mengakibatkan perkelahian antar kelompok kaum borjuis yaitu seperti terjadinya adu mulut antar kelompok kaum borjuis bahkan lebih parahnya memicu bentrok antar kelompok kaum borjuis yang berbeda pilihan dalam memilih kandidat calon kepala desa tersebut.

c. Renggangnya Hubungan Antar Kaum Borjuis

Pemilihan kepala desa berdampak pada renggangnya hubungan antar kaum borjuis. Merenggangkan hubungan antar kaum borjuis ini disebabkan oleh adanya perbedaan pilihan antar kaum borjuis. Perbedaan pilihan inilah yang mengakibatkan terjadinya persaingan dan perselisihan antar kaum borjuis sehingga memicu kerenggangan hubungan tersebut.

4. Dampak Positif dan Negatif Kaum Borjuis Terhadap Kebijakan Kepala Desa

Kaum borjuis tidak hanya membantu calon kepala desa hanya sebatas kampanye. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa terpilih yang di mana kebijakan yang dikeluarkan itu cukup kontroversi yaitu adanya aktivitas pengambilan kerikil yang terjadi tepatnya di dusun satu. Mulanya aktivitas pengambilan kerikil itu berjalan normal tanpa adanya penghalangan dari masyarakat dusun setempat, hal ini disebabkan oleh pernyataan pemerintah desa Malino yang menyatakan bahwa aktivitas pengambilan kerikil tersebut diperuntukkan untuk membangun jalan atau lorong (kantong produksi). Selang beberapa waktu mulai terdengar desas-desus keluhan masyarakat dusun satu yang banyak mengeluhkan persoalan air bersih yang lumpuh

total akibat aktivitas penggalian yang dilakukan ditengah sungai dengan menggunakan alat berat dan menyebabkan air keruh dan jalanan berdebu oleh aktivitas tersebut. Kemarahan masyarakat memuncak setelah mereka mengetahui bahwa kerikil yang diambil secara terus menerus itu bukan diperuntukan untuk kebutuhan perbaikan pembangunan desa, tetapi digunakan sebagai material pengerjaan proyek di desa lain yang mana proyek tersebut milik kaum borjuis yang telah bekerja sama dengan kepala desa Malino.

Hal ini berujung dengan dilakukannya musyawarah antara masyarakat dusun satu dan kepala desa guna mencapai kesepakatan. Mediasi yang dilakukan berjalan dengan panas hingga beberapa masyarakat sudah mulai tidak terkendali akibat dari keberpihakan yang dilakukan oleh kepala desa Malino, yang terlihat seperti tidak ingin aktivitas pengambilan kerikil tersebut diberhentikan. Dengan berbagai macam tawaran mulai dengan pengambilan kerikil secara manual dan ganti rugi apabila ada masyarakat yang dirugikan. Namun tawaran tersebut justru di tolak mentah-mentah oleh masyarakat dusun satu dengan alasan pihak desa tidak mampu memberi solusi bagi kebutuhan mereka.

Dalam hal ini sangat nampak jelas bahwa kepala desa lebih berpihak terhadap kaum borjuis dibandingkan masyarakatnya sendiri. Dapat penulis pahami bahwa pemerintah desa Malino terkhusus kepada kepala desa yang bekerja sama dengan kaum borjuis yang hanya memikirkan keuntungan sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat, jika praktek seperti ini terus dilakukan akan menjadi budaya yang sangat buruk

bagi sistem pemerintahan desa hal ini dapat memicu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akibat tidak adanya transparansi.

Kaum borjuis apabila dikendalikan dengan sebagaimana fungsinya dibutuhkan dalam bidang perekonomian harusnya pemerintah dapat mengelolah dan memanfaatkan mereka sebagai penyumbang pajak desa terbesar dengan mengikat mereka dengan peraturan desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagai undang-undang desa yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan desa baik manusia maupun aset yang dimiliki.

5. Kaum Borjuis Sebagai Ikatan Sosial dan Kekuatan Modal

Kaum borjuis yang berada di desa Malino menjalin ikatan sosial yang baik dengan masyarakat desa Malino sekilas tak ada yang membatasi ruang lingkupnya. Dalam kekuatan modal kaum borjuis sangat mendominasi hal ini dapat di lihat dari pertumbuhan ekonomi yang dimilikinya yang mampu menguasai hampir 80% kekuatan ekonomi yang ada di desa Malino dimana banyak warga desa Malino menjual lahan mereka baik berupa sawah maupun perkebunan kelapa, dan lahan kosong lainnya kepada kaum borjuis. Bahkan warga yang menjual lahan kosong tersebut kembali bekerja pada kaum borjuis tersebut baik itu menggarap sawah atau menjaga sarang walet di atas lahan yang di jualnya. Sosok kaum borjuis tersebut adalah ko ahu.

6. Calon Kepala Desa yang Mendapat Dukungan Kaum Borjuis

Calon kepala desa yang mendapat dukungan dari kaum borjuis dalam

proses pemilihan kepala desa Malino salah satunya yaitu kepala desa terpilih bapak Irfan. Dukungan yang didapatkan kepala desa tersebut diberikan secara langsung dari ko ahu selaku pengusaha besar. Pemberian modal dilakukan mulai dari proses pencalonan sampai menjadi kepala desa terpilih di tahun 2019. hal ini, di lihat dari indikasi permainan politik yang tidak sehat dengan menggunakan uang dan sembako sebagai alat kampanye baik pada basis pendukungnya sendiri maupun di luar basis. Hampir semua pekerja yang di miliki ko ahu yang khususnya berada di desa Malino menjadi tim sukses dari Irfan selaku calon kepala desa Malino sekaligus menjadi kepala desa terpilih.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan mengenai Peran Kaum Borjuis dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pemilihan kepala desa di desa Malino sudah dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada tahun 2006, 2012, 2019 dan 2023. Dalam pemilihan kepala desa terdapat campur tangan kaum borjuis dimana kaum borjuis ini (1) berperan dalam kampanye, kaum borjuis sebagai tim sukses melakukan kampanye tetapi dalam melakukan kampanye kaum borjuis tidak sesuai dengan himbauan yang diberikan untuk tidak menerima sogokan. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan masih ada oknum-oknum yang menerima sogokan dari para kandidat calon kepala desa seperti *money* politik berupa sogokan uang dan sembako. (2) berperan sebagai kekuatan modal, kaum borjuis mempunyai peranan dalam memenangkan calon kepala desa. dominasi dalam bidang perekonomian sangat berpengaruh dalam membiayai jalannya kampanye secara terang terangan maupun sembunyi-sembunyi dengan tujuan memenangkan pemilihan. dan (3) berperan sebagai kekuatan jaringan, kaum borjuis memiliki peranan sebagai kekuatan jaringan dimana kaum borjuis ini membangun relasi yang nantinya menimbulkan keuntungan untuk kandidat calon kepala desa.

Dalam pemilihan kepala desa peran kaum borjuis memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif peran kaum borjuis dalam pemilihan

kepala desa yaitu: (1) bertambahnya solidaritas internal dalam kelompok, solidaritas kaum borjuis yang memiliki tujuan yang sama menjadikan para anggota kelompok



menjadi aktif dalam berinteraksi guna mendiskusikan atau menyusun strategi untuk memenangkan pasangan kandidat calon yang menjadi dukungan kelompok kaum borjuis tersebut. (2) mengubah perilaku pasif menjadi aktif, maksud dari pernyataan tersebut adalah bentuk kesadaran diri dari pribadi kaum borjuis meskipun kesadaran itu karna kepentingan yang mengubah dari perilaku pasif menjadi aktif. Kemudian dampak negatif kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa yaitu: (1) terjadinya pemaksaan hak untuk memilih kandidat calon kepala desa, pemaksaan ini terjadi dan dialami oleh para pekerja atau buruh yang bekerja untuk kaum borjuis. Bentuk pemaksaan yang dilakukan kaum borjuis terhadap para pekerjanya berupa perintah untuk memilih kandidat calon kepala desa yang menjadi jagoannya. (2) terjadinya konflik, Konflik yang terjadi antar kelompok kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa adalah perbedaan pilihan dalam memilih kandidat calon kepala desa. Kemudian konflik tersebut mengakibatkan perkelahian antar kelompok kaum borjuis yaitu seperti terjadinya adu mulut antar kelompok kaum borjuis bahkan lebih parahnya memicu bentrok antar kelompok kaum borjuis yang berbeda pilihan dalam memilih kandidat calon kepala desa tersebut. dan (3) renggangnya hubungan antar kaum borjuis, Merenggangkan hubungan antar kaum borjuis ini disebabkan oleh adanya perbedaan pilihan antar kaum borjuis. Perbedaan pilihan inilah yang mengakibatkan terjadinya persaingan dan perselisihan antar kaum borjuis sehingga memicu kerenggangan hubungan tersebut.

Selain itu, terdapat dampak positif dan negatif kaum borjuis terhadap kebijakan yang dikeluarkan kepala desa terpilih. Dampak positifnya adalah relasi yang di bangun kepala desa terpilih dapat

membantu perekonomian desa melalui pajak yang dikeluarkan pemerintah desa untuk masuk ke kas desa dan dampak negatifnya adalah kebijakan yang dikeluarkan kepala desa yang seharusnya di peruntukkan untuk kepentingan masyarakatnya ternyata hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak tanpa memikirkan apakah sudah sesuai kebutuhan masyarakatnya atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai “Peran Kaum Borjuis dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala)”, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat desa Malino pentingnya kesadaran diri terhadap setiap keputusan yang diambil untuk memilih dan menentukan pemimpin kedepannya, merubah pola pemikiran dengan memilih calon pemimpin dengan melihat-lihat bobot, bibit, bebetnya, dan kualitas yang dimiliki bukan menentukan pilihan berdasarkan suka dan tidak suka.
2. Bagi para pengawas pemilihan diharuskan untuk melakukan pengawasan bersama untuk mengawal dan menjaga kestabilan kamtibmas di masyarakat dan pentingnya transparansi apabila terindikasi tindakan melanggar aturan dan ketentuan pemilihan harus di laporkan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada calon kepala desa yang terindikasi melakukan kecurangan.
3. Bagi kandidat calon kepala desa supaya diberikan himbauan agar tidak melakukan tindakan money politik seperti memberi sogokan

kepada masyarakat berupa sembako maupu uang.

4. Bagi peneliti selanjutnya apa bila mengkaji hal yang sama di lakukan oleh peneliti umtuk lebih mempertajam lagi agar bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2012) H.35.
- Asnawi Dan Hartuntik, "*Analisis Historis Terhadap Komunis Sebagai Suatu Idiologi Politik*" Dalam Jurnal Seuneubok Lada, V. 2, No.1, 12.
- Budiarjo, Miriam. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*" (Pt. Gramedia Jakarta) 1983), 77.
- Cooper, Scott. "demokrasi Borjuis", <https://www.leftvoice.org/bourgeois-democracy-what-do-marxists-mean-by-that-term/> diakses pada 14 Desember 2024
- Elite Dan Kekuasaan Jurnal Politik, Vol. 4, No. 1, Agustus 2018
- Febriansyah, Hari. *Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Panca Mukti Kecamatan Muara Talang Kabupaten Banyuasin Tahun 2019)*. Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2021
- Harianti, Runi. "*Etika Politik Dalam Negara Demokrasi* ";Dalam Jurnal Demokrasi, V.II, No.1,2003,H.65-66
- Hartanti, Firmansyha Putra, *Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia* .,Jusip-Unja,Vol.2, Januari-Juni 2019
- Hidayat, Rian. *Kuasa Bajingan Dalam Politik Desa (Studi Tentang Dominasi Bajingan Dalam Stabilitas Pemerintahan Desa Di Desa Nyambakan Barat Kaccamatan Batang-Batangka Bupaten Sumenep)* Fakultas Ushhuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018
- Iqbal Hasan, M. *Pokok-Pokok Materi Ideologi Penelitian Dan Aplikasi* (Jakarta: Ghalia, 2002), 19.
- Junior Mogie, Samuel. *Peran Elit Lokal Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa* Vol. 12 No. 2 (2023)
- Jahidin, Selaku Masyarakat "Wawancara" di Kediaman, 2023
- Jurdi, Syarifuddin. *Islamisasi Or Politisasi Islam Di Bima, Final Report Penelitian Kompetitif Individual: Depag Ri. 2010.*, Hlm.18-19
- Kantaparawira, Rusadi. *Sistem Politik Indinesia*, (Bandung ; Sinar Baru Algasindo,2004)
- Kasmian Selaku Tokoh Masyarakat, "Wawancara" di Kediaman Tokoh Masyarakat, 2023

- Lailatul Fajriah, Dwi. "Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dan Sejarahnya", <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-dan-sejarahny> (25 Desember 2023)
- Mainadmin, "Memahami Konsep Hegemoni", <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/memahami-konsep-hegemoni/> diakses Pada 14 Desember 2024
- Masrun, Selaku Masyarakat "Wawancara" di Kediaman, 2023
- Marx, Karl. dan Engels, Frederick. Ideologi Jerman Jilid I- Feuerbach, terjemahan Nasikhul Mutamanna (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2013), h.14
- Mendeison, Wallace "Law And The Development Ofnation', The Journal Of Politic. Vol. 32 (1970), 223.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) Golongan Boijuis/ Borjuasi Adalah Golongan Masyarakat Kelas Menengah, Yaitu Golongan Bangsawan Hartawan
- Pareto, Vilfredo dalam bukunya, The Mind and Society dikutip dari Botomore, Tom B. Elite and Society, New York: Penguin Books Ltd., 1982, h. 7.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung, Edisiterbaru, Citraaditya Bakti,1991), 215.
- Rahardjo, Satjipto. Op.Cit.
- Rahman, Asmika. *Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 1 No 1, 2018
- Rahmat S.Pd. Selaku Masyarakat, "Wawancara" di Kediaman
- Rohim Yunus, Nur. *Implikasi Demokrasi Borjuis Dalam Kehidupan Bernegara*, Vol 3, No 2 (2016)
- Rohim Yunus, Nur. *Implikasi Demokrasi Borjuis Dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Dan Kekuasaan Jurnal Politik, Vol. 4, No. 1, Agustus 2018
- Samekto, Aji. *Mengungkap Relasi Kapitalisme, Demokrasi Dan Globalisasi*, Dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14,No.2 Halaman.306.
- Setiawan, Ihktiar. *Pengaruh Hegemoni Politik Masarakat Trans Migrasi Jawa Terhadap Penduduk Lokal Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin 2016* Fakultas Syariyah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2018

- Siswanti, Enda. *Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci* Jurnal Translitera Edisi 5/2017
- Sosial Dan Budaya Syar-I. Volume 3 No.2(2016)
- Sp Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta:Rajawali Pers. 2010., Hlm.200
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 224-225.
- Sumber Data: Arsip Desa Malino 2020
- Sumber: Pendataan Profil desa oleh mahasiswa KKN 89, 2020
- Syaputra, E. *kekuasaan Elit Lokal Dalam Upaya Penguatan Badan Usaha Milik Desa* Transisi Edisi 1/2020
- Taking, Ketua Adat "Wawancara" di Kediaman Ketua Adat 2020
- Tokopedia, "Borjuis", <https://Kamus.Tokopedia.Com/B/Borjuis/> Diakses Pada 21 April 2022 Pukul 10.30
- Wahjudi, Djaja. *Sejarah Eropa Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern* (Yogyakarta: Ombok, 2012).
- Widjaja, Haw. *Otonom Daerah Dan Daerah Otonomi Edisi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), 270.
- Wiranto Selaku Tokoh Pemuda "Wawancara" di Kediaman Tokoh Pemuda, 2020
- Yunus, Nr. *Akutansi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*".Dalam Jurnal Sosio Didaktika, Vol.2.,No.2,H.158-159.

PEDOMAN WAWANCARA

Biodata Partisipan

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Status Sosial :
Waktu :
Lokasi :

Wawancara

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Nama saya Awaludin mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang sedang melakukan penelitian, saya mohon bantuan dari Saudara/Saudari, Bapak/Ibu untuk membantu saya menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan yang berkaitan dengan penelitian saya.

No.	Pertanyaan
1.	Sejak tahun berapa desa Malino berdiri?
2.	Berapa kali pemilihan kepala desa Malino dilaksanakan?
3.	Bagaimana peran kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa di desa Malino?
4.	Hal apa saja yang menonjol pada pemilihan kepala desa di desa Malino?
5.	Apakah dalam pemilihan kepala desa Malino ada keterlibatan kaum borjuis dalam mendukung calon kepala desa?
6.	Apa dampak positif dan negatif dari kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa Malino?
7.	Apa dampak positif yang ditimbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa yang terpilih?
8.	Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa terpilih?

Jawaban yang diberikan Saudara/Saudari, Bapak/Ibu sudah sangat membantu informasi yang saya butuhkan. Terima kasih untuk bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



HASIL WAWANCARA RESPONDEN 1

Biodata Partisipan

Nama : Rahmat S.Pd
Usia : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Sosial : Guru SDN 01 Malino (tokoh pendidik)
Waktu : 01 Juni 2023
Lokasi : Dusun 3 Malino (kediaman)

Wawancara

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Nama saya Awaludin mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang sedang melakukan penelitian, saya mohon bantuan dari Saudara/Saudari, Bapak/Ibu untuk membantu saya menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan yang berkaitan dengan penelitian saya.

No.	Pertanyaan
1.	Sejak tahun berapa desa Malino berdiri? Jawaban: "Sejak tahun 2004"
2.	Berapa kali pemilihan kepala desa Malino dilaksanakan? Jawaban: "sebanyak 3 kali"
3.	Bagaimana peran kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa di desa Malino? Jawaban: "peran kaum borjuis khususnya mereka yang memiliki karyawan adalah mengarahkan karyawannya untuk satu komando memilih calon kepala desa yang menjadi jagoannya"
4.	Hal apa saja yang menonjol pada pemilihan kepala desa di desa Malino? Jawaban: "Mobilisasi massa melalui pekerjaan yang di mana kaum borjuis ini memeta-metakan karyawannya untuk menjadi tim sukses untuk memenangkan calon kepala desa yang menjadi jagoannya"



5.	Apakah dalam pemilihan kepala desa Malino ada keterlibatan kaum borjuis dalam mendukung calon kepala desa? Jawaban: "Ada"
6.	Apa dampak positif dan negatif dari kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa Malino? Jawaban: "Dampak positif yang ditimbulkan dari pemilihan kepala desa adalah menjadikan kaum borjuis yang tadinya pasif menjadi aktif mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa demi mencapai tujuan kemenangan"
7.	Apa dampak positif yang ditimbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa yang terpilih? Jawaban: "Dampak positif yang ditimbulkan adanya pembaharuan infrastuktur desa berupa pembangunan tempat wisata"
8.	Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa terpilih? Jawaban: "Dampak negatif yang ditimbulkan berupa keberpihakan pemerintah desa dalam memuluskan kegiatan pengambilan kerikil di dusun 1 yang di lakukan oleh salah satu pengusaha yang mana aktivitas tersebut membuat masyarakat marah hingga melakukan aksi pengusiran terhadap aktivitas pengambilan kerikil"

Jawaban yang diberikan Saudara/Saudari, Bapak/Ibu sudah sangat membantu informasi yang saya butuhkan. Terima kasih untuk bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



HASIL WAWANCARA RESPONDEN 2

Biodata Partisipan

Nama : Kasmian
Usia : 52 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Sosial : Tokoh masyarakat
Waktu : 01 Juni 2023
Lokasi : Kediaman

Wawancara

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Nama saya Awaludin mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang sedang melakukan penelitian, saya mohon bantuan dari Saudara/Saudari, Bapak/Ibu untuk membantu saya menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan yang berkaitan dengan penelitian saya.

No.	Pertanyaan
1.	Sejak tahun berapa desa Malino berdiri? Jawaban: "Desa Malino berdiri sejak tahun 2004 sejak pemekaran diri dari desa Sibayu"
2.	Berapa kali pemilihan kepala desa Malino dilaksanakan? Jawaban: "Pemilihan kepala desa Malino telah dilaksanakan sebanyak tiga kali"
3.	Bagaimana peran kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa di desa Malino? Jawaban: "Mereka berusaha memenangkan calon kepala desa yang menjadi jagoannya"
4.	Hal apa saja yang menonjol pada pemilihan kepala desa di desa



	<p>Malino?</p> <p>Jawaban: "Hal-hal yang menonjol dari pagelaran pilkades desa Malino di tandai dengan adanya kampanye yang dilakukan oleh tim sukses maupun calon kadesnya sendiri"</p>
5.	<p>Apakah dalam pemilihan kepala desa Malino ada keterlibatan kaum borjuis dalam mendukung calon kepala desa?</p> <p>Jawaban: "Pada pemilihan tahun 2019 ada salah satu dari calon kepala desa mendapatkan bantuan berupa suntikan dana dari salah satu pengusaha"</p>
6.	<p>Apa dampak positif dan negatif dari kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa malino?</p> <p>Jawaban: "Dampak positif yang ditimbulkan kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa yaitu bertambahnya solidaritas antar kelompok yang masuk dalam perkumpulan kaum tersebut. Dan dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya pemaksaan hak bersuara untuk memilih kandidat kepala desa"</p>
7.	<p>Apa dampak positif yang ditimbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa yang terpilih?</p> <p>Jawaban: "Dampak positif yang ditimbulkan melancarkan setiap aktifitas yang dilaksanakan oleh para pemilik modal dalam pengerjaan proyek yang ada di desa Malino"</p>
8.	<p>Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa terpilih?</p> <p>Jawaban: "Dampak negatif yang ditimbulkan keberpihakan kepala desa terpilih terhadap masyarakat yang bukan dari golongan yang pro terhadapnya atau tidak mendukungnya dalam pemilihan"</p>

Jawaban yang diberikan Saudara/Saudari, Bapak/Ibu sudah sangat membantu informasi yang saya butuhkan. Terima kasih untuk bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

HASIL WAWANCARA RESPONDEN 3

Biodata Partisipan

Nama : Wiranto
Usia : 27 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Sosial : Tokoh pemuda
Waktu : 01 Juni 2023
Lokasi : Kediaman

Wawancara

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Nama saya Awaludin mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang sedang melakukan penelitian, saya mohon bantuan dari Saudara/Saudari, Bapak/Ibu untuk membantu saya menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan yang berkaitan dengan penelitian saya.

No.	Pertanyaan
1.	Sejak tahun berapa desa Malino berdiri? Jawaban: "Desa Malino mekar pada tahun 2004 setelah memisahkan diri dari desa Sibayu selaku desa induk"
2.	Berapa kali pemilihan kepala desa Malino dilaksanakan? Jawaban: "Pemilihan kepala desa Malino telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 3 periode kepemimpinan kepala desa Malino"
3.	Bagaimana peran kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa di



	<p>desa Malino?</p> <p>Jawaban: "Kaum borjuis berperan sebagai pemodal dalam membiayai salah satu calon kades dalam kegiatan kampanye"</p>
4.	<p>Hal apa saja yang menonjol pada pemilihan kepala desa di desa Malino?</p> <p>Jawaban: "Banyak bantuan dadakan yang ditujukan pada masarakat dengan mengikutsertakan calon kades"</p>
5.	<p>Apakah dalam pemilihan kepala desa Malino ada keterlibatan kaum borjuis dalam mendukung calon kepala desa?</p> <p>Jawaban: "Ada, beberapa orang terindikasi memberikan modal pada calon kepala desa dalam pembiayaan selama kampanye dan serangan fajar demi memenangkan calon kepala desa"</p>
6.	<p>Apa dampak positif dan negatif dari kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa malino?</p> <p>Jawaban: "Dampak positif yang ditimbulkan menguntungkan calon kepala desa dalam membiyai kampanye dampak negatif yang ditimbulkan akan ada keberpihakan terhadap kebijakan yang menguntungkan kaum borjuis"</p>
7.	<p>Apa dampak positif yang ditimbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa yang terpilih?</p> <p>Jawaban: "Dampak positif yang ditimbulkan menambah ruang gerak bagi kaum borjuis dalam memonopoli setiap pengerjaan proyek yang di lakukan pemerintah desa Malino dalam membenahi profil desa"</p>
8.	<p>Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa terpilih?</p> <p>Jawaban: "Dampak negatif yang ditimbulkan kurangnya transparansi kepada masyarakat mengenai tiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa"</p>

Jawaban yang diberikan Saudara/Saudari, Bapak/Ibu sudah sangat membantu informasi yang saya butuhkan. Terima kasih untuk bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



HASIL WAWANCARA RESPONDEN 4

Biodata Partisipan

Nama : Jahidin
Usia : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Sosial : Tokoh Masyarakat
Waktu : 01 Juni 2023
Lokasi : Kediaman

Wawancara

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Nama saya Awaludin mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang sedang melakukan penelitian, saya mohon bantuan dari Saudara/Saudari, Bapak/Ibu untuk membantu saya menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan yang berkaitan dengan penelitian saya.

No.	Pertanyaan
1.	Sejak tahun berapa desa Malino berdiri? Jawaban: "Sejak tahun 2004"
2.	Berapa kali pemilihan kepala desa Malino dilaksanakan?



	Jawaban: "Pemilihan di laksanakan sebanyak 3 kali"
3.	<p>Bagaimana peran kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa di desa Malino?</p> <p>Jawaban: "Kaum borjuis berperan dibalik layar dan menggunakan anggota atau para buruh yang bekerja dengannya dijadikan sebagai tim pemenangan"</p>
4.	<p>Hal apa saja yang menonjol pada pemilihan kepala desa di desa Malino?</p> <p>Jawaban: "Kampanye, pembagian sembako dadakan bahkan sebagian ada yang di berikan uang saku"</p>
5.	<p>Apakah dalam pemilihan kepala desa Malino ada keterlibatan kaum borjuis dalam mendukung calon kepala desa?</p> <p>Jawaban: "Ada"</p>
6.	<p>Apa dampak positif dan negatif dari kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa Malino?</p> <p>Jawaban: "Kaum borjuis memiliki dampak positif dalam pemilihan kepala desa yaitu menambah solidaritas antar kaum borjuis yang memilih calon kandidat kepala desa yang sama dan dampak negatifnya adalah adanya pemaksaan suara untuk memilih kepala desa"</p>
7.	<p>Apa dampak positif yang di timbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa yang terpilih?</p> <p>Jawaban: "Tidak ada dampak positif"</p>
8.	<p>Apa dampak negatif yang di timbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa terpilih?</p> <p>Jawaban: "Dampak negatif yang di timbulkan banyak kebijan pemerintah desa yang menguntungkan kaum borjuis berupa pengambilan dan pengelolaan alam yang ada di desa Malino"</p>

Jawaban yang diberikan Saudara/Saudari, Bapak/Ibu sudah sangat membantu informasi yang saya butuhkan. Terima kasih untuk bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



HASIL WAWANCARA RESPONDEN 5

Biodata Partisipan

Nama : Taking
Usia : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Sosial : Ketua adat
Waktu : 01 Juni 2023
Lokasi : Kediaman

Wawancara

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Nama saya Awaludin mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang sedang melakukan penelitian, saya mohon bantuan dari Saudara/Saudari, Bapak/Ibu untuk membantu saya menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan yang berkaitan dengan



penelitian saya.

No.	Pertanyaan
1.	Sejak tahun berapa desa Malino berdiri? Jawaban: "Sejak tahun 2004"
2.	Berapa kali pemilihan kepala desa Malino dilaksanakan? Jawaban: "Sebanyak 3 kali sejak pemilihan pertama dilaksanakan yaitu pada tahun 2006, 2012 dan 2019"
3.	Bagaimana peran kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa di desa Malino? Jawaban: "Kaum borjuis memiliki peranan penting dalam pendanaan dalam membiayai kampanye"
4.	Hal apa saja yang menonjol pada pemilihan kepala desa di desa Malino? Jawaban: "Hal-hal yang menonjol pada pemilihan kepala desa Malino yaitu kampanye secara terang-terangan dan secara diam-diam."
5.	Apakah dalam pemilihan kepala desa Malino ada keterlibatan kaum borjuis dalam mendukung calon kepala desa? Jawaban: "Ada"
6.	Apa dampak positif dan negatif dari kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa Malino? Jawaban: "Dampak positif dari kaum borjuis membantu secara instan untuk masyarakat yang telah menjadi partisipan politiknya dalam mendukung calon kepala desa dampak negatifnya masyarakat yang telah menjadi partisipan memiliki utang budi hingga tak bisa lagi memilih calon lainnya"
7.	Apa dampak positif yang di timbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa yang terpilih? Jawaban: "Tidak ada dampak positif yang di timbulkan karena hanya akan menguntungkan sepihak"
8.	Apa dampak negatif yang di timbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa terpilih? Jawaban: "Keputusan yang dicampurtangankan dengan utang budi politik akan menjadikan kebijakan yang hanya menguntungkan sepihak"

Jawaban yang diberikan Saudara/Saudari, Bapak/Ibu sudah sangat membantu informasi yang saya butuhkan. Terima kasih untuk bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

HASIL WAWANCARA RESPONDEN 6

Biodata Partisipan

Nama : Masrun
Usia : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Sosial : Tokoh Masyarakat
Waktu : 26 Oktober 2023
Lokasi : Kediaman
Wawancara



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Nama saya Awaludin mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang sedang melakukan penelitian, saya mohon bantuan dari Saudara/Saudari, Bapak/Ibu untuk membantu saya menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan yang berkaitan dengan penelitian saya.

No.	Pertanyaan
1.	Sejak tahun berapa desa Malino berdiri? Jawaban: "Mulai berdiri pada tahun 2004"
2.	Berapa kali pemilihan kepala desa Malino dilaksanakan? Jawaban: "Pemilihan kepala desa telah di laksanakan sebanyak 4 kali
3.	Bagaimana peran kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa di desa Malino? Jawaban: "Mereka berperan sebagai fasilitator kampanye sekaligus menjadi pemodal utama"
4.	Hal apa saja yang menonjol pada pemilihan kepala desa di desa Malino? Jawaban: "Giat kampanye menggunakan barang dan uang"
5.	Apakah dalam pemilihan kepala desa Malino ada keterlibatan kaum borjuis dalam mendukung calon kepala desa? Jawaban: "Mereka terlibat sebagai pemodal"
6.	Apa dampak positif dan negatif dari kaum borjuis dalam pemilihan kepala desa Malino? Jawaban: "Dampak positifnya sebagian ada yang dapat bibit durian dan negatifnya mencederai demokrasi"
7.	Apa dampak positif yang ditimbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa yang terpilih? Jawaban: "Jika kaum borjuis ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan maka dampaknya akan kurang baik untuk masyarakat"
8.	Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari keterlibatan kaum borjuis dalam mempengaruhi kebijakan kepala desa terpilih? Jawaban: "Berpengaruh buruk untuk masyarakat"

Jawaban yang diberikan Saudara/Saudari, Bapak/Ibu sudah sangat membantu informasi yang saya butuhkan. Terima kasih untuk bantuan



yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

DOKUMENTASI

1. DOKUMENTASI BERSAMA SEKRETARIS DESA MALINO



2. DOKUMENTASI BERSAMA TOKOH PEMUDA



3. DOKUMENTASI BERSAMA TOKOH PENDIDIK



4. DOKUMENTASI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PENULIS



Nama : Awaludin
Tempat Tanggal Lahir : Sibayu, 09 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki



Anak Ke : 1 dari 5 Bersaudara
Status Keluarga : Anak Kandung
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Jalan Setia Budi

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Masrun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Dusun II Malino
2. Nama Ibu : Nurdiana
Agama : Islam
Pekerjaan : URT (Urusan Rumah
Tangga)
Alamat : Dusun II Malino

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD : SD (Lulus Tahun 2011)
SMP/MTS : SMP (Lulus Tahun 2015)
2. SMA/SMU/MA : (Lulus Tahun 2018)
3. S1 : Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD),
Jurusan Pemikiran Politik Islam (Lulus Tahun 2024)

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Pemikiran Politik Islam (2019)
2. Sekretaris Karang Taruna Elang Bayuong 2019-Sekarang
3. Anggota LPA ANALIS 2020-Sekarang
4. Kader KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) 2018-
Sekarang
5. Dewan Pembina Organisasi Forum Pemuda Mahasiswa Malino (FPMM)
2023

